

**PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (PFK) TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM
DI KABUPATEN BLITAR.**

Tesis

Oleh :

Zulfa Ulin Nuha

16800001



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (PFK) TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM
DI KABUPATEN BLITAR.**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh :

Zulfa Ulin Nuha

16800001

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
JULI 2018**

Tesis dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Feminisasi Kemiskinan (PFK) Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Malang, 28 Juni 2018

Pembimbing I

Dr. Hj. Indah Vuliana, SE., MM

NIP. 197409182003122004

Malang, 28 Juni 2018

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A

NIP. 197307192005011003

Malang, 28 Juni 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A

NIP. 197307192005011003

Tesis dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Feminisasi Kemiskinan (PFK) Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2018.

Dewan Penguji

Dr. H. Achmad Sani Sapriyanto, SE., M.Si

Ketua

Nip. 197207122003121003

Dr. Siswanto, SE., M.Si

Penguji Utama

Nip. 197509062006041001

Dr. Hj. Indah Yuliana, SE., MM

Anggota

NIP. 197409182003122004

Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A

Anggota

NIP. 197307192005011003

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.

NIP. 195507171982031005



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Ulin Nuha
NIM : 16800001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 18 Juli 2018

Hormat Saya,



Zulfa Ulin Nuha

Nim. 16800001

MOTTO

Agama tanpa ilmu adalah buta, Ilmu tanpa agama adalah lumpuh
(Albert Einstein)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR Ahmad)

Kesadaran adalah matahari
Kesabaran adalah bumi
Keberanian adalah cakrawala
dan
Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua serta adik tercinta, Bapak Khayin, Ibu Siti Najmiyati serta Latoiful minan yang selalu mengingatkan kewajiban yang harus ditunaikan kepada sang pemilik hati, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat tulus untukku. Doa yang selalu terpanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku. Kalian inspirasi, motivasi dan penyemangatku.
2. Suami serta buah hati tercinta, Imron Rosyadi serta Muhammad Al-Fatih yang selalu memberikan harapan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayangnya yang diberikan dengan ikhlas tanpa pamrih, semoga selalu dalam lindungan dan ridho-Nya.
3. Seluruh teman-teman Magister Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu menjadi penyemangat dalam mencari ilmu, merajut ukhuwah islmiyah dan menjadi tempat berbagi, semoga hubungan persaudaraan dan silaturahmi akan terus terjalin.
4. Dan yang terakhir untuk ALMAMATER kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT tesis yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Indah Yuliana, SE., MM selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Seluruh staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Bapak Drs. Mujianto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yang telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Anam, Bapak Anton dan Bapak Zen selaku pendamping kabupaten program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang telah banyak

memberi masukan, arahan, saran, dan bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan selama melakukan penelitian.

9. Seluruh Kepala Desa dan Pendamping Desa yang telah menerima baik kehadiran peneliti, serta khusunya Kepala Rumah Tangga Perempuan sasaran program yang bersedia menjadi subyek dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua serta adik tersayang, Bapak Khayin, ibu Siti Najmiyati serta latoiful minan yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin.
11. Suami serta buah hati tercinta, Imron Rosyadi serta Muhammad Al-Fatih yang selalu memberi dorongan moril maupun materil, perhatian, pengertian yang tidak bisa tergantikan dan terbayarkan oleh suatu apapun selama studi.
12. Semua keluarga di Kediri dan Blitar yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.

Tesis ini peneliti suguhkan kepada segenap pembaca dengan harapan adanya saran, kritik yang bersifat komprehensif demi perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT.

Batu, 18 Juli 2018

Peneliti

Zulfa Ulin Nuha

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak Indonesia	xv
Abstrak Inggris	xvi
Abstrak Arab	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Definisi Istilah	26
II. KAJIAN PUSATAKA	
A. Kajian Teoritik	31
1. Pemberdayaan	31
a. Konsep Pemberdayaan	31
b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	34
c. Konsep Pemberdayaan Perempuan	36
d. Pemberdayaan Perempuan Perspektif Islam	37
e. Unsur-unsur Pemberdayaan Perempuan	40
2. Ekonomi Keluarga	45
a. Pengertian Status Ekonomi Keluarga	45
b. Aspek-aspek Ekonomi Keluarga	46
3. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan	50
a. Feminisasi	50
b. Konsep Kemiskinan	51
c. Feminisasi Kemiskinan	53
B. Kerangka Berfikir	54

III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Kehadiran Peneliti	58
C. Latar Penelitian	58
D. Data dan Sumber Data Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	69
G. Pengecekan Keabsahan Data	71
IV. PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	74
B. Paparan Data Penelitian	77
1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)	77
2. Dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi	97
C. Temuan Penelitian	103
1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)	103
2. Dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi	107
V. PEMBAHASAN	
A. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar	111
B. Dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar	125
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Keluarga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Blitar	9
1.2 Data kepala rumah tangga perempuan penerima bantuan PFK di Kabupaten Blitar tahun 2016	10
1.3 Penelitian Terdahulu	23
3.1 Ringkasan teknik <i>Snowball Sampling</i>	62
3.2 Pengelompokan Informan Berdasarkan Tahapan Pemberdayaan	64
4.1 Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2016	75
4.2 Hasil Temuan Penelitian Terkait Tahap Pelaksanaan Program	105
4.3 Hasil Temuan Penelitian Terkait Dampak Program PFK	109
5.1 Korelasi tahapan pemberdayaan Isbandi Rukminto dengan proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program PFK	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rancangan Sederahan Usaha Kecil	14
2.1 Tahapan Pedampingan dan Pembinaan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil	15
2.1 Kerangka Berfikir	54
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Blitar	75
4.2 Data Prosentase Penduduk Per-Agama Kabupaten Blitar tahun 2016	76
4.3 Web Jarik Lurik Mothercare Jatim	93
4.4 Gambar Bagan Organisasi Struktural dan fungsional Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan	97
4.5 Temuan Penelitian	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Nara Sumber Penelitian	144
2. Dokumentasi kegiatan penelitian	145



ABSTRAK

Ulin Nuha, Zulfa. 2018. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Indah Yuliana, SE., MM, (2) Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., Ma.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), Peningkatan Ekonomi, Keluarga Muslim.

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Indonesia khususnya point lima yang memiliki maksud meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merancang program khusus untuk memberdayakan perempuan dengan latar belakang janda produktif yang keadaan perekonomiannya masuk kedalam kategori desil 1 berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011. Penelitian bertujuan untuk memotret pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar dan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga muslim yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi partisipasi pasif, studi dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber dimana pengujiannya dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kadin PMD Kabupaten Blitar, Kasi PMD kecamatan yang bersangkutan, Kepala desa sasaran program, pendamping kabupaten, pendamping desa dan KRTP sasaran program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterlibatan semua pihak pelaksana dari jajaran provinsi hingga desa sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah provinsi melalui pendamping desa menyediakan web khusus yang dapat membantu KRTP sasaran mempromosikan usaha yang dijalankannya dan juga membantu KRTP terhubung dengan lembaga-lembaga sosial yang ada. (2) Ada penambahan nilai yang ditimbulkan dari program PFK jika dikorelasikan dengan indikator perekonomian Husain Syahatah yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan usaha perekonomian rumah tangga muslim terdapat keberlangsungan dan pertambahan kapasitas dalam usaha yang dilaksanakannya, selain itu dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan keseharian dan menjadi sumber pendapatan atau hanya sebatas pada tambahan.

ABSTRACT

Ulin Nuha, Zulfa. 2018. Economic Empowerment of Family through Alleviation of Feminism Poverty (PFK) to the improvement of Moslem Family Economy in Blitar Regency. Thesis, Majors of Sharia Economics, Post-Graduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Advisors: (1) Dr. Hj. Beautiful Yuliana, SE., MM, (2) Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., Ma.

Keywords: Economic Empowerment of Family, Alleviation of Feminism Poverty (PFK), Economic Improvement, Moslem Family

Implementation of economic empowerment through several means of economic empowerment of family is considered to be important thing to pursue the purposes of Indonesia's Sustainable Development Goals, especially the five points which imply to improve the empowerment of women to develop their talents and potentials. In this case, the Government of East Java has designed a special program to empower the women with the background of productive widows, who have the economic level of the 1st decile category based on the Integrated Database (BDT) of the National Team of Acceleration of Poverty Alleviation (TNP2K) in 2011. This study aims to capture the economic empowerment of family through the program of Feminism Poverty Alleviation (PFK) which is executed in Blitar District and analyze its impact on the economic improvement of existing moslem family.

This study uses a qualitative approach and case-study design. The data are collected by the technique of interview, passive participation observation, documentation study and literature study. The data analysis technique includes data reduction, data presentation, and conclusion or verification. To check the validity of research findings, the researcher employs source triangulation by comparing and rechecking the credence degree of information. The informants who are involved in this research are Head of Empowerment Community Department of Blitar District, Head of the related sub-district empowerment department, Head of program target, district counselors, village counselors, and KRTP of program target.

The research findings show that: (1) Participation of all executors from the Governments of East Java and local governments is very influential to the success of program implementation, in the hope that the government is able to support this program through the medium of village counselor to provide particular website to help the target of KRTP in the program promotion and help KRTP to be connected to the existing social institutions. (2) Indication of value increase that is raised from the program of PFK if it is correlated to the economic indicators of Husain Syahatah which stated that the sustainability and capacity increase might appear within the implementation process of moslem family economy. Furthermore, this implementation is able to comply with the daily needs and transfer into both the income source and additional income.

الملخص

أولي النهي، زلف. 2018. التمكين الاقتصادي للأسرة من خلال تأنيث الفقر (PFK) من أجل تحسين الاقتصاد الأسري في موسلين في مقاطعة بليتار. أطروحة، برنامج الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، مستشار: (1) الحاجة. انداح يوليانا الماجستير، (2) الحج أحمد جلال الدين الماجستير.

المصطلحات الرئيسية: التمكين الاقتصادي للأسرة، تأنيث الفقر (PFK)، التحسن الاقتصادي، الأسرة المسلمة.

إن التمكين الاقتصادي من خلال جهد التمكين الاقتصادي للأسرة أمر لا يمكن أن يكون قابلاً للتفاوض. أحد أهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا ، وخاصة النقاط الخمس التي تهدف إلى تحسين تمكين المرأة لتنمية مواهبها وقدراتها ، وفي هذه الحالة ، قامت حكومة مقاطعة جاوة الشرقية بتصميم برنامج خاص لتمكين المرأة من خلفية الأرامل المنتجين الذين تنسم حالة الاقتصاد في الفئة الأولى من العشرية استناداً إلى قاعدة البيانات المتكاملة (BDT) للفريق الوطني لتسريع الحد من الفقر (PPP2K) في عام 2011. تهدف الدراسة إلى التمكين من تمكين الأسرة اقتصادياً من خلال تأنيث الفقر (PFK) في مقاطعة بليتار وتحليل تأثيره على التحسن الاقتصادي للعائلات المسلمة.

يستخدم هذا البحث نهج نوعي مع تصميم دراسة الحالة. تم جمع البيانات عن طريق تقنية المقابلة ، ومراقبة المشاركة السلبية ، ودراسة الوثائق ودراسة الأدب. تتضمن تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات أو التحقق. التحقق من صحة النتائج باستخدام تثليث المصدر حيث يتم الاختبار من خلال مقارنة وإعادة فحص درجة ثقة المعلومات. المبلغون في هذا البحث هم كاديين PMD كابوباتن بليتار ، رئيس إدارة البيئة المشتركة في المقاطعة الفرعية ، رئيس قرية البرنامج المستهدفة ، مساعد المقاطعة ، ميسر القرية وهدف البرنامج المقترح.

تشير نتائج البحث إلى ما يلي: (1) إن مشاركة جميع الأطراف المنفذة من مستوى المقاطعة إلى مستوى القرية يؤثر بشكل أكبر على نجاح تنفيذ البرنامج ، لدعم التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة الإقليمية من خلال ميسر القرية لتوفير شبكة خاصة تستطيع أن تساعد هدف برنامج الحكومة الأفريقية على تشجيع النشاط التجاري الذي يديره ويساعد أيضاً مع المؤسسات الاجتماعية القائمة. (2) هناك إضافة للقيمة المتولدة من برنامج PFK إذا كان مرتبطاً بمؤشر اقتصادي حسيين شحاته يذكر أنه في تنفيذ أعمال اقتصاد الأسرة المسلمة هناك استمرارية وزيادة القدرة في أعمالها ، إلى جانب تنفيذه يمكن أن يفي بالمتطلبات اليومية ويصبح مصدراً للدخل أو فقط إلى حد ما.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi yang meningkat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.¹ Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.²

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan harus dimulai dari keluarga. Pemberdayaan keluarga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud pemberdayaan sosial adalah bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan, ketrampilan, ekonomi dan akses-akses lainnya.³ Adapun salah satu indikator perekonomian keluarga muslim yaitu dalam sistem perekonomian keluarga muslim didalam transaksi-transaksinya seperti berinfak, menabung, kepemilikan,

¹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hal 37

² Mardi Yatmo Hutomo, *Pmeberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

³ Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*. (Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

pemberian zakat, investasi dan lain-lain dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya.⁴

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Indonesia khususnya point 5 yang memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak partisipasi yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang publik dan swasta.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar setiap elemen masyarakat mampu diberdayakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, namun upaya tersebut tidak berjalan dengan mulus, sehingga setiap diadakannya program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, seolah menjadi program yang secara *normativ* mampu disikapi dengan minim. Pada kenyataannya tingkat kemampuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia belum tercapai. Bahkan pada sisi lain, pemberdayaan perempuan merupakan tolak ukur keberhasilan program yang secara kuantitatif mampu memenuhi harapan dari pemerintah pusat. Menurut Isbandi Rukminto Adi, tahapan-tahapan pemberdayaan terbagi menjadi tujuh tahap yaitu: 1. Tahap persiapan, 2. Tahap

⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Penerjemah Dudung R.H. dan Idhoh Anas, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm 48-49

assessment, 3. Tahap perencanaan, 4. Tahap formulasi, 5. Tahap pelaksanaan dan 6. Tahap terminasi.⁵

Selama ini program-program yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan bahkan untuk masyarakat luas, belum terpenuhi, karena berbagai macam kendala yang tidak bisa diurai, karena berhubungan dengan informasi yang diterima oleh masyarakat seutuhnya. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat dikurangi dengan melakukan percepatan melalui penanggulangan kemiskinan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*, dengan bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal.⁶

Hasil penelitian Rosalia Indriyati Septaningsih menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat meningkatkan motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyadaran lingkungan hidup kelompok mampu mengembangkan diversifikasi olahan pangan berbahan dasar lokal.⁷ Hasil penelitian Amin Kuncoro dan Kadar menunjukkan bahwa kelompok usaha bersama merupakan wadah atau tempat berbagi ilmu tentang pemberdayaan dan kreatifitas warga. Selain itu, kelompok usaha bersama mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh warga masyarakat terlebih keluarga yang berpartisipasi didalamnya dalam hal peningkatan kehidupan.⁸

⁵ Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Baru, 2012), hal 35-37

⁶ Roni Ekha Putra, *Analisis terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia*, (Jurnal Demokrasi UNP, vol 6, 2007) hlm, 37-62

⁷ Rosalia Indriyati S, *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jurnal seminar nasioanal Universitas PGRI Yogyakarta, 2015), hal 512-524

⁸ Amin Kuncoro & Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, (Jurnal Buana Gender, Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016), hal 45-54

Pancasila dan UUD 1945 telah mengamanatkan penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran Negara ditengah-tengah permasalahan masyarakat menjadi nyata. Amanat Negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat khususnya yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2015-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama *Wong Cilik*”.

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya.⁹ Pusat data BNP2KTKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) juga menyebutkan Jawa Timur merupakan salah satu dari lima daerah

⁹“Provinsi Jawa Timur Penyumbang TKI Terbesar”, <https://news.okezone.com/read/2016/12/26/519/1575720/provinsi-jawa-timur-penyumbang-tki-terbesar>, diakses pada tanggal 12 April 2018

sumber TKI terbesar di Indonesia, lima daerah sumber tersebut yaitu yaitu Jawa Barat sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah sebanyak 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang, Nusa Tenggara Barat 23.859 orang, Sumatra Utara 11.952 orang.¹⁰

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2016 di Jawa Timur mencapai angka 270.000 yang terdiri dari 80 persen Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan 20 persen laki-laki.¹¹ Pernyataan ini didukung oleh data jumlah TKI menurut kawasan atau negara penempatan dan jenis kelamin tahun 2015 yang menunjukkan bahwa jumlah TKI perempuan jauh lebih banyak jika dibandingkan jumlah TKI laki-laki, dimana jumlah TKI perempuan sebesar 166.771 orang dan jumlah TKI laki-laki sebesar 108.965 orang.¹²

Namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh laporan tingginya angka perceraian di Tuban, setiap tahun lebih dari dua ribu janda baru lahir dari ketukan palu hakim di Pengadilan Agama (PA) setempat, itu artinya setiap hari terlahir enam perempuan yang menyandang status *single parent*.¹³ Hal serupa juga terjadi di kota Surabaya, hanya dalam waktu dua bulan terdapat 195 kasus cerai gaib di Surabaya.¹⁴ Maraknya kasus perceraian juga terjadi di Blitar, pada tahun 2015

¹⁰ <http://www.bnptki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI>, diakses pada tanggal 18 Juli 2018

¹¹ Rois Jejeli, "Retimen TKI dari Jawa Timur Diperkirakan Tembus Rp 1,7 Triliun", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3238836/remiten-tki-dari-jawa-timur-diperkirakan-tembus-rp-17-triliun>, diakses pada tanggal 12 April 2018.

¹² <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1808>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018

¹³ "Sehari, Enam JANDA BARU", Radar Tuban, Selasa, 23 Februari 2016, hlm 34

¹⁴ "Suami Merantau, Istri Kehilangan Jejak", Jawa Pos, Sabtu, 28 Maret 2015, hlm 27

terdapat 4.864 kasus perceraian yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama setempat, dan mayoritas angka perceraian yang terjadi di Blitar didominasi oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesai (TKI).¹⁵

Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya. Masalah lain diantaranya yaitu, kepala rumah tangga perempuan jauh lebih rentan miskin (dikarenakan kepala rumah tangga perempuan memikul sendiri beban ekonomi keluarga, selain bekerja harus mengurus anak). Diskriminasi perempuan terhadap akses permodalan, upah kerja dan kepemilikan properti. Selama ini dirasa sasaran program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada data base. Penanggulangan program kemiskinan selama ini cenderung bersifat homogen (model penanggulangan cenderung bersifat homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik rumah tangga sasaran). Bantuan program selama ini cenderung bersifat *top down* (cenderung sesuai keinginan pemberi bantuan, rumah tangga sasaran hanya sebagai objek program). Hasil penelitian Hastuti & Diah respati menunjukkan bahwa diperlukannya model pemberdayaan perempuan miskin dengan memperhatikan keterlibatan perempuan agar secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya perdesaaan, penguatan perempuan miskin merupakan inti pemberdayaan perempuan dan akan optimal apabila

¹⁵ “TKI Dominasi Kasus Perceraian Di Blitar”, <https://blitar.memo-x.com/2538/tki-dominasi-kasus-perceraian-di-blitar.html>, diakses pada tanggal 11 April 2018.

perempuan diberi kesempatan setara dengan laki-laki dalam pemanfaatan sumberdaya di pedesaan.¹⁶

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program khusus yaitu program Jalin Matra (jalan lain menuju mandiri dan sejahtera), program Jalin Matra ini merupakan lanjutan dari program Jalin Kesra (jalan lain menuju kesejahteraan) yang dilaksanakan pada periode 2009-2014. Didalam program Jalin Matra terdapat tiga program unggulan yaitu program Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulanagn Kerentanan Kemiskinan (PK2), program Jalin Matra ini dilounging pada tanggal 16 Desember 2014 dan akan dilaksanakan pada masa kerja tahun 2015-2019.

Namun tidak semua program Jalin Matra disalurkan ke setiap kabupaten sasaran, misalnya saja Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar hanya menerima bantuan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Untuk penerima bantuan PFK di Blitar ada 24 desa dari sembilan kecamatan yang masuk dalam kategori PFK, sementara untuk kategori PK2 ada sembilan desa dari enam kecamatan yang ada di kabupaten Blitar, desa-desa yang ditunjuk mendapatkan bantuan Jalin Matra ini sudah ditentukan oleh Pemprov Jatim. Bantuan yang digulirkan Pemprov Jatim ini

¹⁶ Hastti & Diah Respati, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan*, (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Jogjakarta), hal 1-16

tidak berbentuk uang tunai, namun berupa barang modal senilai Rp. 2.500.000 yang akan dipergunakan untuk mengembangkan kreatifitas sasaran program.¹⁷

Untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama untuk kepala keluarga yang dikepalai oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), program PFK ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek, tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.¹⁸ Terdapat kriteria umum dan khusus untuk penerima program tersebut. Kriteria umumnya adalah: rumah tangga penerima program adalah rumah tangga yang memiliki status kesejahteraan 10% terendah berdasarkan pemutakhiran data terpadu (PDBT) tahun 2015, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan, KRTP yang memiliki ART berusia produktif (15-65) tahun dan atau KRTP sebatang kara berusia produktif, dalam satu desa terdapat lebih dari 10 KRTP dan atau di prioritaskan lebih dari 20 KRTP.¹⁹ Sedangkan kriteria khususnya diantaranya adalah: bercerai, suami meninggal, diterlantarkan suami selama 6 bulan, suami difabel atau sakit menahun.²⁰

Beberapa indikator keberhasilan program yang digagas pemerintah diantaranya yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat pemanfaatan.²¹ Untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut, Pemprov Jatim bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

¹⁷ Gie Hartawan, "Dinas PMD Kab.Blitar Salurkan Bantuan Jalin Matra untuk Warga Rentan dan Janda Miskin", <http://www.swaranews.co.id/blog/2017/04/17/dinas-pmd-kab-blitar-salurkan-bantuan-jalin-matra-untuk-warga-rentan-dan-janda-miskin/>, diakses pada tanggal 12 April 2018

¹⁸ Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 7

¹⁹ Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 15

²⁰ Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 17

²¹ Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 21

& kader PKK, Perguruan Tinggi, dan tim penggerak PKK (Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa).²² Berikut paparan data jumlah keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan menurut kelompok umur kepala keluarga dengan status kesejahteraan rendah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.1. Jumlah Keluarga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Blitar.
(Sumber: Berdasarkan Kepmensos Nomor 5757/HUK/2017)

No	Nama Kecamatan	Jumlah keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan			
		Usia di bawah 45 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	TOTAL
1	BAKUNG	39	203	686	928
2	WONOTIRTO	54	251	926	1,231
3	PANGGUNGREJO	66	250	848	1,164
4	WATES	51	210	629	890
5	BINANGUN	92	338	1,008	1,438
6	SUTOJAYAN	86	378	927	1,391
7	KADEMANGAN	133	546	1,558	2,237
8	KANIGORO	230	619	1,397	2,246
9	TALUN	117	450	1,001	1,568
10	SELOPURO	116	389	763	1,268
11	KESAMBEN	126	384	886	1,396
12	SELOREJO	94	313	749	1,156
13	DOKO	67	241	593	901
14	WLINGI	104	428	960	1,492
15	GANDUSARI	165	549	1,302	2,016
16	GARUM	209	514	1,095	1,818
17	NGLEGOK	148	531	1,151	1,830
18	SANANKULON	209	488	982	1,679
19	PONGGOK	283	775	1,731	2,789
20	SRENGAT	191	586	1,210	1,987
21	WONODADI	143	380	819	1,342
22	UDANAWU	134	344	666	1,144
Jumlah		2,857	9,167	21,887	33,911

Berdasarkan tabel diatas, tidak semua kecamatan diberikan bantuan program feminisasi kemiskinan oleh pemerintah, namun bantuan feminisasi kemiskinan

²² Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 23

tersebut bersifat random dan bergulir. Dalam penelitian ini peneliti mengambil obyek penelitian penerima bantuan PFK tahun 2016, karena dirasa tahun anggaran 2016 sudah mampu menggambarkan bagaimana pelaksanaan bantuan PFK di tahun 2015 yang menjadi awal pelaksanaan program tersebut. Berikut data kepala keluarga perempuan penerima bantuan program feminisasi kemiskinan tahun 2016 di Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2. Data kepala rumah tangga perempuan penerima bantuan PFK di Kabupaten Blitar tahun 2016.

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Jawa Timur)

No	KECAMATAN	DESA	KRTP	Total @ Kecamatan
1	Garum	Pojok	28	228
2	Garum	Tingal	39	
3	Garum	Slorok	50	
4	Garum	Sidodadi	47	
5	Garum	Karangrejo	64	
6	Gandusari	Butun	29	214
7	Gandusari	Sumberagung	43	
8	Gandusari	Gadungan	40	
9	Gandusari	Sukosewu	46	
10	Gandusari	Soso	33	
11	Gandusari	Semen	23	214
12	Kanigoro	Sawentar	85	188
13	Kanigoro	Papungan	28	
14	Kanigoro	karangsono	42	
15	Kanigoro	Tlogo	33	
16	Selopuro	Popoh	21	130
17	Selopuro	Ploso	24	
18	Selopuro	Selopuro	60	
19	Selopuro	Mandesan	25	
Jumlah			760	760

Berangkat dari kontruksi konteks penelitian di atas, maka kemudian peneliti ingin mengetahui dampak program tersebut terhadap kelompok sasaran yaitu

kepala rumah tangga perempuan terhadap peningkatan ekonomi keluarga muslim yang akhirnya peneliti mengangkat judul penelitian **“Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) terhadap peningkatan ekonomi keluarga muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memotret pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) terhadap peningkatan ekonomi keluarga muslim.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar” selain sebagai persyaratan mendapatkan gelar Magister bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, dan semua pihak yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal tersebut, manfaat dapat ditinjau dari dua aspek yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan tentang feminisasi dan gambaran perekonomian keluarga yang dikepalai oleh perempuan di Kabupaten Blitar, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi dan gambaran dari penelitian yang telah ada.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister di Prodi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal itu selaras dengan tugas mahasiswa dalam tridharma perguruan tinggi bahwa terdapat tiga hal yakni pengajaran atau pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian. Di sisi lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai media

aplikasi keilmuan peneliti yang telah ditempuh selama dibangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat Kabupaten Blitar

Memberikan pemahaman tentang apakah pelaksanaan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sudah sesuai dengan tujuan program tersebut dan memberi gambaran apakah tujuan tersebut sudah dirasakan.

b. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi acuan program pemberdayaan ekonomi keluarga pada program-program pemerintah selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Rosalia Indriyati Septaningsih, Melakukan Penelitian berjudul *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pemberdayaan perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi local dapat meningkatkan motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyadaran lingkungan

hidup, keompok mampu mengembangkan deversifikasi olahan pangan berbahan dasar lokal.²³

Retno Endah Supeni dan Maheni Ika Sari. Melakukan penelitian berjudul *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan sederhana pengembangan manajemen usaha kecil yang berkelanjutan dan dapat dengan mudah diaplikasikan bagi perempuan desa. Berdasarkan hasil penggalan data dan informasi di Desa Wirolegi maka dapat diusulkan rancangan sederhana pengembangan manajemen usaha kecil yang berkelanjutan dan dapat dengan mudah diaplikasikan bagi perempuan sebagai berikut:²⁴



Gambar 1.1. Rancangan Sederhana Usaha Kecil (Sumber: Retno Endah Supeni 2011).

Sedangkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Wirolegi Kabupaten Jember melalui pengembangan manajemen usaha kecil direncanakan dengan tahapan sebagaimana terlihat pada gambit sebagai berikut:

²³ Rosalia Indriyati Septiyaningsih, *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jurnal seminar nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 2015), hal 512-524

²⁴ Retno Endah Supeni, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*, (Jurnal Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, 2011), hal 101-111



Gambar 1.2. Tahapan Pendampingan dan Pembinaan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Sumber: Retno Endah Supeni 2011).

Amin Kuncoro dan Kadar melakukan penelitian berjudul *Pengaruh pemberdayaan perempuan dan peningkatan sumberdaya ekonomi keluarga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan perempuan dan peningkatan sumberdaya ekonomi di Desa Sambiroto sebelum dan sesudah adanya kelompok usaha bersama (KUBE). Dengan uji analisis beda 2 rata-rata dapat dijelaskan bahwa kelompok usaha bersama merupakan wadah atau tempat berbagi ilmu tentang pemberdayaan dan kreatifitas warga, terlihat dari indikator semakin tingginya warga yang bersedia untuk berpartisipasi. Selain itu, kelompok usaha bersama pun mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh warga masyarakat Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam hal peningkatan kehidupan.²⁵

Murniati Ruslan melakukan penelitian berjudul *Pemberdayaan perempuan dalam dimensi pembangunan berbasis gender*. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara focus tentang pemberdayaan perempuan dalam dimensi

²⁵ Amin Kuncoro & Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, (Jurnal Buana Gender, Vol 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016), hal 45-54

pembangunan yang berbasis gender. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan dua catatan. Pertama, tampak bahwa strategi pemberdayaan perempuan tersebut bertitik tolak dari paradigma Samir Amin “*development of underdevelopment*” atau apa yang oleh Robert Chambers disebut sebagai “*putting the last first*” (mendahulukan yang terakhir). Paradigma ini menempatkan kelompok yang paling rentan, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan manusia lanjut usia, pada kedudukan yang istimewa. Artinya, memberikan prioritas kepada kelompok tersebut untuk mengembangkan diri dan keluarganya agar kelak mereka dapat terbebas dari ketidak berdayaan, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Ini merupakan pilihan bijak karena sesungguhnya kemiskinan yang mendera lebih dari satu milyar manusia itu sebagian besar di antaranya adalah kaum perempuan. Hanya dengan cara demikian, apa yang disebut pembangunan berbasis gender dapat benar-benar terwujud sehingga tidak sekadar slogan atau retorika yang tak kunjung teralisasi. Kedua, meskipun ikhtiar pemberdayaan perempuan perlu mendapat perhatian khusus, pemberdayaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terlepas dari *grand strategy* pembangunan nasional secara umum. Karena itu, yang diperlukan adalah strategi yang menjadikan ikhtiar pemberdayaan perempuan tersebut sebagai salah satu inti spirit pembangunan nasional. Inilah yang disebut dengan pemberdayaan perempuan berdimensi gender, yakni upaya mengembangkan kemampuan kaum perempuan agar mereka dapat menjadi mitra sejajar kaum laki-laki dalam membangun Indonesia ke depan.²⁶

²⁶ Murniati Ruslan, *Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*,

Sri Mawanti dan Ismi Dwi Astutui melakukan penelitian berjudul *Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif di kabupaten Karangnyar*. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis potensi perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, (2) menganalisis peluang perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif (3) mengkaji hambatan pengembangan kewirausahaan menuju ekonomi kreatif untuk memberdayakan perempuan miskin, (4) menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan dan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan miskin, dan (5) merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perempuan miskin di daerah perdesaan perlu diberdayakan melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif. Model yang diusulkan adalah *pro-poor capacity improvement model* (PCIM). Komponen utama pemberdayaan perempuan miskin adalah: (1) adanya dukungan seluruh *stakeholders* (baik pemerintah, swasta, LSM maupun Perguruan Tinggi) untuk melakukan program-program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender, (2) Adanya *Achievement Motivation Training* untuk menumbuhkan kesadaran (keberdayaan) akan pentingnya mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, (3) Pemantapan jejaring antar sesama perempuan miskin pelaku usaha serta pengusaha local sebagai media *learning by doing*, (4) Pembentukan

kelompok-kelompok usaha bersama atas dasar kesamaan jenis usaha, (5) Pengembangan kreativitas melalui *capacity building* agar produk yang dihasilkan menarik bagi pembeli dan sesuai selera pasar dan memperhitungkan potensi pasar, (7) Perluasan Sistem Bapak Angkat dengan melibatkan sebanyak mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal usaha dan pasar bagi perempuan miskin pelaku usaha.²⁷

Dwi Ratnasari melakukan penelitian berjudul *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren*. Penelitian ini bertujuan untuk memotret interaksi pendidikan pesantren dengan keilmuan modern dalam isu gender sehingga melahirkan sensitivitas gender. Hasil penelitian ini adalah dalam konteks pemberdayaan perempuan, dimana tujuannya disamping meningkatkan kualitas yang dimiliki perempuan, juga bagaimana seorang perempuan mempunyai kepribadian yang bernuansa Qur'ani atau tidak bertentangan dengan norma-norma islam, Melalui pendidikan pesantren, perempuan tidak hanya berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai spiritualitas yang mereka yakini. Pendidikan pesantren tidak hanya berjalan dengan mengandalkan nilai-nilai yang ada tanpa adanya konsiderasi dengan perkembangan masyarakat ataupun sebaliknya. Pada dasarnya pesantren telah melakukan pemberdayaan, tapi memang perlu dilanjutkan sehingga proses pendidikan itu memperoleh hasil yang lebih baik.²⁸

²⁷ Sri Marwanti & Ismi Dwi Astuti, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karangnyar*, (Jurnal SEPA, Vol 9 No 1, September 2012), hal 134-144

²⁸ Dwi Ratnasari, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren*, (Jurnal 'Ainil Islam, Vol 9 No 1, Juni 2016), hal 124-147

Hasanatul Jannah melakukan penelitian yang berjudul *Pemberdayaan Perempuan Dalam Spiritualisme Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang pemberdayaan perempuan dalam spiritualitas islam, dimana sudah semstinya perempuan berani memulai memberdayakan dirinya sendiri dengan melakukan upaya-upaya revolusioner seperti memiliki manajemen waktu, menambah wawasan informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan dalam islam diberikan peran dan peluang yang sama dalam mengemban tugas kekhilafahan di muka bumi untuk mewujudkan kebaikan bersama, dan disini perempuan sudah semstinya bisa mengelola tanggung jawab yang dipikulnya semaksimal mungkin selama tidak melanggar ketentuan Allah SWT. Dalam menjalankan misi tersebut sudah semestinya perempuan mampu membentuk kepribadian dan sikap hidup yang produktif dan berkualitas sehingga bisa membawa pada kedudukan yang terhormat dan bermartabat.²⁹

Farida Hydro Foilyani melakukan penelitian yang berjudul *Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Pembangunan*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan: (1) Latar belakang kehidupan sosial perempuan di desa Samboja Kuala, (2) Upaya yang dilakukan perempuan di desa Samboja Kuala dalam memenuhi kebutuhannya, (3) Upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di Desa Samboja Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar

²⁹ Hasanatu Jannah, *Pemberdayaan Perempuan dalam Spiritualisme Islam*, (Jurnal KARSA, Vol 19 No 2, 2011), hal 136-145

belakang perempuan di Desa Samboja Kuala Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah, pernikahan di usia muda menyebabkan mereka tidak mampu bertahan dan akhirnya bercerai, sehingga secara sosial dan ekonomi tidak dapat berdaya. Upaya yang dilakukan oleh perempuan di Desa Samboja Kuala dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah mereka berupaya menjadi tenaga buruh seperti pembuat ikan kering, penimbang ikan di TPI, pembuat keranjang tempat ikan dan membuka took dengan skala kecil. Upaya yang dilakukan dalam rangka memberdayakan perempuan di Desa Samboja Kuala adalah dengan diberikannya keterampilan dan pelatihan, adanya bantuan modal bergulir serta bantuan dalam bentuk peralatan. Secara umum perempuan Desa Samboja Kuala masih perlu diberdayakan mengingat pendidikan mereka yang masih rendah, banyak dari mereka menyangkal status janda sehingga mereka hanya mengandalkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya tanpa memiliki keahlian maupun ketrampilan. Sehingga mereka secara umum dapat ikut serta didalam pembangunan baik sebagai subyek dan obyek.³⁰

Agung Utama, Titin Hera Widi Handayani melakukan penelitian yang berjudul *Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal di kecamatan Wedi kabupaten Klaten*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil perempuan miskin di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, mengukur potensi perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi local di Kecamatan Wedi, dan

³⁰ Farida Hydro Foilyani, *Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Pembangunan*, (Jurnal WACANA, Vol 12 No 3, Juli 2009), hal 592-608

mengetahui efektifitas model Project Based Learning sebagai model pelatihan kewirausahaan berbasis potensi local di Kecamatan Wedi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin di Kecamatan Wedi masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, memiliki akses pendidikan yang terbatas serta pendapatan yang rendah. Perempuan miskin di Kecamatan Wedi memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon enterpreneur atau wirausaha. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan miskin di Kecamatan Wedi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model Project Based Learning dinilai efektif dikarenakan sebagian besar peserta sukses ditinjau dari tingkat penguasaan kepribadian (jiwa) kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki selama memperoleh pengalaman belajar bisnis riil dengan model *Project Based Learning*.³¹

Hastuti, Diyah Respati melakukan penelitian yang berjudul *Model pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya pedesaan upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan*. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan lahan upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hasil penelitian ini adalah diperlukan model pemberdayaan perempuan miskin dengan memperhatikan keterlibatan perempuan agar secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya pedesaan. Penguatan perempuan miskin merupakan inti

³¹ Agung Utama, Titin Hera widi Handayani, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, (Jurnal Penelitian Humaniora, Vol 19 No 2, Oktober 2014), hal 154-167

pemberdayaan perempuan dan akan optimal apabila perempuan diberi kesempatan setara dengan laki-laki dalam pemanfaatan sumberdaya di pedesaan.³²

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu
(Sumber: Data Diolah dari Beberapa Sumber)

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
1	Hastuti, Diyah Respati, <i>Model pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya pedesaan upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan</i> , 2009	Merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan lahan upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan	Studi pustaka	Diperlukan model pemberdayaan perempuan miskin dengan memperhatikan keterlibatan perempuan agar secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya pedesaan. Penguatan perempuan miskin merupakan inti pemberdayaan perempuan dan akan optimal apabila perempuan diberi kesempatan setara dengan laki-laki dalam pemanfaatan sumberdaya di pedesaan.
2	Farida Hydro Foilyani, <i>pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan</i> , 2009	Mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan latar belakang kehidupan sosial, upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di Desa Samboja Kuala.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan perempuan di Desa Samboja sebagian besar masih tergolong rendah, upaya yang dilakukan untuk memnuhi kebutuhannya adalah mereka berupaya menjadi tenaga buruh, dan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di Desa Samboja dengan diberikannya ketrampilan dan pelatihan, adanya bantuan bergulir serta bantuan dalam bentuk peralatan.
3	Murniati Ruslan, <i>Pemberdayaan perempuan dalam</i>	Mengeksplorasi tentang pemberdayaan	Studi pustaka	Pemberdayaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau terlepas dari <i>grand</i>

³² Hastuti & Diyah Respati, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan*, (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negri Jogjakarta, 2009), hal 1-16

	<i>dimensi pembangunan berbasis gender, 2010</i>	perempuan yang berwawasan gender		<i>strategy</i> pembangunan nasional secara umum, karena itu yang diperlukan adalah strategi yang menjadikan ikhtiar pemberdayaan perempuan sebagai salah satu inti spirit pembangunan nasional.
4	Retno Indah Supeni, Maheni Ika Sari, <i>Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil, 2011</i>	Menyusun rancangan sederhana pengembangan manajemen usaha kecil yang berkelanjutan dan dapat dengan mudah diaplikasikan perempuan desa	Kualitatif	Gambar 1.1 dan gambar 1. 2.
5	Hasanatul Jannah, <i>pemberdayaan perempuan dalam spiritualisme islam (suatu upaya menjadikan perempuan produktif), 2011</i>	Mengekplorasi pemberdayaan perempuan dalam spiritualitas Islam	Studi pustaka	Perempuan dalam Islam diberikan peran dan peluang yang sama dalam mengemban tugas kekhilafahan di muka bumi, dan sudah semestinya perempuan bisa mengelola tanggungjawab yang dipikulnya semaksimal mungkin selama tidak melanggar ketentuan Allah SWT.
6	Sri Mawanti, Ismi Dwi Astutui, <i>model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif di kabupaten Karangnyar, 2012</i>	1) menganalisis potensi perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, 2) menganalisis peluang perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan keluarga, 3) mengkaji hambatan pengembangan kewirausahaan	Kualitatif	1) Perempuan miskin di Kabupaten Karangnyar mempunyai potensi untuk mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, 2) Perempuan miskin di Kabupaten Karangnyar mempunyai peluang untuk mengembangkan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif, 3) salah satu hambatan-hambatan yang dihadapi untuk mengembangkan kewirausahaan keluarga adalah masih terbatasnya pengetahuan pada sebagian besar perempuan miskin pelaku usaha,

		<p>menuju ekonomi kreatif untuk memberdayakan perempuan miskin,</p> <p>4) menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan dan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi perempuan miskin,</p> <p>5) merumuskan model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif.</p>		<p>4) Kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangnyar dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan seperti: peningkatan akses perempuan terhadap pengetahuan dan ketrampilan tentang manajemen, informasi pasar, modal usaha, dll,</p> <p>5) berdasarkan hasil analisis mengenai potensi, peluang, hambatan dan kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Karangnyar yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan miskin dirumuskan model yang disebut <i>pro-poor capacity improvement model</i> (PCIM).</p>
7	<p>Agung Utama, Titin Hera Widi Handayani, <i>Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal di kecamatan Wedi kabupaten Klaten</i>, 2014</p>	<p>Mendeskripsikan profil perempuan miskin di Kecamatan Wedi, mengukur potensi perempuan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi lokal, dan mengetahui efektivitas model Project Based Learning sebagai model pelatihan kewirausahaan dalam rangka pemberdayaan perempuan miskin berbasis potensi lokal di Kecamatan Wedi.</p>	Kualitatif	<p>Perempuan miskin di Kecamatan Wedi masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, memiliki akses pendidikan yang terbatas serta pendapatan yang rendah, memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon entrepreneur atau wirausaha. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan miskin di Kecamatan Wedi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model Project Based Learning dinilai efektif dikarenakan sebagian besar peserta sukses ditinjau dari tingkat penguasaan kepribadian (jiwa) kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki</p>

				selama memperoleh pengalaman belajar bisnis riil dengan model <i>Project Based Learning</i> .
8	Rosalia Indriyati S, <i>Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan</i> , 2015	Merumuskan strategi Penentasan Kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan	Observasi partisipasi, dokumentasi dan wawancara mendalam	melalui pemberdayaan, perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat meningkatkan & memberi motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyadaran lingkungan hidup, kelompok mampu mengembangkan deversifikasi olahan pangan berbahan dasar lokal.
9	Amin Kuncoro, <i>Kadar, pengaruh pemberdayaan perempuan dan peningkatan sumberdaya ekonomi keluarga</i> , 2016	Mengetahui pengaruh pemberdayaan perempuan dan peningkatan sumberdaya ekonomi keluarga di Desa Sambiroto sebelum dan sesudah adanya kelompok usaha bersama (KUB)	Deskriptif kuantitatif	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh warga masyarakat Desa Sambiroto khususnya anggota perempuan yang ada dalam kelompok tersebut.
10	Dwi Ratnasari, <i>pemberdayaan perempuan dalam pendidikan pesantren</i> , 2016	Mengekplorasi pemberdayaan perempuan dalam bingkai pendidikan pesantren	Studi pustaka	Melalui pendidikan pesantren, perempuan tidak hanya berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan tapi tidak juga meninggalkan nilai-nilai spiritualitas yang mereka yakini.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, terdapat beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini khusus membahas tentang pemberdayaan ekonomi keluarga muslim yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan berkategori miskin. Keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan sangat rawan miskin karena mereka harus memikul beban ekonomi keluarga serta harus mengurus anggota keluarga secara bersamaan.
2. Penelitian ini khusus membahas tentang Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, dimana program tersebut dikhususkan untuk mengangkat perekonomian keluarga miskin yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian.³³ Oleh sebab itu dalam rangka mempermudah pembahasan serta pemahaman pembaca, maka diperlukan definisi istilah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan focus penelitian sebagaimana di atas. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan ialah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan bersinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolufif,³⁴ meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang

³³ PPS UIN Malang, *Pedoman Penelitian Tesis, Disertasi, dan Makalah* (Malang: PPS UIN Malang, 2015), hlm. 33

³⁴ Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 74-75

beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*).³⁵

Pendapat lain menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.³⁶

Upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:³⁷

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti

³⁵ *Ibid*, hal 77

³⁶ Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 169

³⁷ Ginanjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1995), hal 95

tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.

2. Ekonomi Keluarga

Secara bahasa ekonomi keluarga terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor-

faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Bentuk keluarga yang demikian dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.³⁸

3. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) adalah salah satu program pemerintah Jawa Timur untuk mengurangi permasalahan kemiskinan berwajah perempuan. Sasaran program ini dikhususkan untuk kepala rumah tangga perempuan yang keadaan perekonomiannya jauh dikatakan dari sejahtera.

4. Peningkatan Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, pengertian peningkatan ekonomi seringkali diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Prof Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang

³⁸ <https://www.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga>

ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang: kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk: Ketiga, penggunaan teknologi secara efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.³⁹

5. Keluarga Muslim

Keluarga muslim menurut konsep Islam diartikan sebagai sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana islami dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syari'at. Tujuan keluarga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tentram, kasih sayang dan rahmat dengan mengharap ridha Allah baik didunia maupun di akhirat.⁴⁰

³⁹ Jhingan, M.L, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2000), hlm 57

⁴⁰ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Penerjemah Dudung R.H. dan Idhoh Anas, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 38 - 39

BAB II

KAJIAN PUSTKA

A. Landasan Teoritik

1. Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut: 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi, 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi, dan 4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideology secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).⁴¹

Menurut Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan

⁴¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000) hal 1-2

dan mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi yang meningkat tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.⁴²

Proses pemberdayaan masyarakat miskin menurut Pranarka dan Moeldjarto, dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase yaitu: *pertama, fase finansial*. semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. *Kedua, fase partisipatoris* adalah proses pemberdayaan dari pemerintah bersama masyarakat yang sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. *Ketiga, fase emansipatif*, adalah proses pemberdayaan dari rakyat dan untuk rakyat dan didukung pemerintah bersama rakyat. Paradigma pemberdayaan tersebut akan mendorong kemampuan pemberdayaan perempuan untuk memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politik dalam meningkatkan kemandirian perempuan.⁴³

Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

1. Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

⁴² Mubiyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 1996), hal 37

⁴³ Pranarka dan Moeldjarto, *Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1996)

⁴⁴ Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Baru, 2012), hal 35-37

2. Tahap Assessment, Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan, Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng data di lapangan.
6. Tahap Evaluasi. Pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.

7. Tahap Terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bisa mandiri, bukan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.⁴⁵

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non-ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya.⁴⁶

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan

⁴⁵ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

⁴⁶ *Idem*

yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.⁴⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Husain Syahatah, rumah tangga atau keluarga menurut konsep islam yaitu: Sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana Islami dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syari'at. Tujuan rumah tangga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tenteram, kasih sayang, dan rahmat, dengan mengharap ridha Allah di dunia dan akhirat.⁴⁸

Adapun indikator bagi perekonomian rumah tangga muslim menurut pendapat Husein Syahatah yaitu sebagai berikut⁴⁹:

- a. Perekonomian rumah tangga muslim dianggap sebagai suatu kumpulan norma syara' yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad pada ulama.
- b. Sistem perekonomian Islam bagi rumah tangga merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam bagi negara, dengan pertimbangan bahwa sistem

⁴⁷ Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

⁴⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Penerjemah Dudung R.H. dan Idhoh Anas, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 38 - 39

⁴⁹ Husen Syahatah, *Op. Cit.*, hlm. 48 - 49

perekonomian rumah tangga itu bekerja di bawah sistem dan norma-norma syari'at Islam.

- c. Sistem perekonomian rumah tangga muslim di dalam transaksi-transaksi, seperti berinfak, menyimpan, menabung, kepemilikan, pemberian zakat, dan lain-lain, dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya.
- d. Tujuan utama sistem perekonomian rumah tangga muslim adalah menerapkan aturan-aturan transaksi agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual dan material bagi anggota rumah tangga, sebab pemenuhan kebutuhan materi membantu perwujudan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang seimbang.

Indikator perekonomian rumah tangga muslim di atas merupakan acuan bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang pada prinsipnya perekonomian rumah tangga menurut konsep islam lebih mengedepankan terpenuhinya kebutuhan material sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang seimbang dibawah bimbingan norma-norma syari'at Islam.

c. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengasentuasikan sifat-sifat "*people centered, participatori improving and sustainable*" (terpusat, partisipasi aktif yang berkelanjutan).⁵⁰ Konsep ini dikembangkan banyak ahli dan praktisi untuk mencari upaya yang disebut "*alternatif development*" (alternatif pembangunan) yang menghendaki "*inclusive democracy*" (demokrasi inklusif), *appropriate*

⁵⁰ Kartasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 1996), hlm, 249

economic growth, gender equality and intergenerational equality” (pertumbuhan ekonomi yang tepat, kesetaraan gender dan kesetaraan antar generasi).⁵¹

Bila dibandingkan dengan laki-laki, kaum perempuan lebih banyak dihadapkan pada jaringan-jaringan kekuasaan yang memerangkap mereka pada citra baku yang justru menggelisahkan mereka.⁵²

Konsep pemberdayaan sebagai paradigma juga telah dikaji oleh Moser. Menurut Moser strategi pemberdayaan sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada kaum pria. Pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.⁵³

d. Pemberdayaan Perempuan Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan dalam Islam adalah kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarya dengan tetap melaksanakan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Tidak selalu harus dalam bentuk bekerja di luar rumah, menjadi wanita karir, atau pencari nafkah secara utuh bagi keluarga. Keutamaan seorang perempuan adalah yang mampu berkarya di dalam rumah, menciptakan rumah tangga yang harmonis, dan mendidik generasi penerus menjadi generasi

⁵¹ *Idem*

⁵² Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam buku Sangkar Peran Gender, Irwan Abdullah, (Yogyakarta:PKK-UGM, 1996)

⁵³ Moser, C.O.N, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training (terjemahan Hartian Silawati)*, (London/ New York: Routledge, 1993)

yang berkualitas. Alangkah indahnyanya andai seluruh masyarakat memahami konsep pemberdayaan perempuan secara benar, berupa konsep pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu upaya optimalisasi potensi pada perempuan.

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai konsep peran yang khusus untuk laki-laki maupun perempuan, kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang sangat khas untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan saling tolong menolong. Al-Qur'an cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan masing-masing manusia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai dan harmonis. Yang menjadi perhatian Al-Qur'an adalah adanya jaminan keamanan terhadap mereka, lebih-lebih jaminan terhadap pelecehan atas mereka, baik atas nama norma agama maupun norma sosial.⁵⁴

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada diri perempuan bertumpu pusat pendidikan dan pembinaan generasi. Eksistensi perempuan sebagai diri pribadi, istri, ibu dan bagian dari masyarakat menuntut untuk menjadi perempuan yang produktif dan berkualitas sehingga keberadaan perempuan menjadi berdaya dan tidak menjadi manusia lemah seperti yang dikhawatirkan Rosulullah SAW terhadap kaumnya apabila ditinggalkannya.

Salah satu jalan untuk memulai pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan keilmuan dan kecerdasannya. Karena hanya dengan kecerdasan menurut Toffler akan membantu manusia dalam menganalisis problem sehingga

⁵⁴ M. Quraish Shihab, "Kesetaraan Gender dalam Islam" kata pengantar *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, oleh Nasarudin Umar, (Jakarta:Paramadina, 1999), xxxvii

mampu mengintegrasikan informasi dan menjadi lebih mandiri, dan imajinatif⁵⁵. Demikian juga dalam Islam bahwa orang yang berilmu dan cerdas akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁶

Untuk itu perempuan, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memperkaya diri dengan pengetahuan dan senantiasa melakukan peningkatan diri⁵⁷.

Kita tahu dalam sejarah bahwa Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, adalah seorang saudagar yang sukses. Kita pun pernah mendengar seorang perempuan pada masa Nabi SAW yang turun ke medan perang dengan gagah berani. Ummu

⁵⁵ Alfin Toffler, *Gelombang Ketiga*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1992), hlm. 10.

⁵⁶ Qs. Al-Mujadilah: 11

⁵⁷ Al-Ghazali menjabarkan peningkatan diri dengan perbaikan akhlak (menumbuhkembangkan sifat-sifat terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela pada diri pribadi seseorang melalui: (a) *Metode taat syari'at*; Dengan melakukan kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syari'at; (b) *Metode pengembangan diri/psiko-edukatif*; (c) *Metode Kesufian/ spiritualitas-relegius* yang bertujuan meningkatkan kualitas pribadi dengan berkarya dalam masyarakat

Salamah adalah pendiri sistem pendidikan usia dini (taman kanak-kanak), Rabia'ah Al-Adawiyah selaku tokoh sufi perempuan, dan masih banyak lagi tokoh perempuan muslimah yang memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak menghalangi perempuan untuk berkarya selama ia mampu membagi peran dengan baik dan tidak menyalahi aturan Allah SWT.

e. Unsur-unsur Pemberdayaan Perempuan

Terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. *Welfare (Kesejahteraan)*

Kesejahteraan dikatakan salah satu unsur yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi kedalam tiga unsur utama berikut.⁵⁹

Partisipasi ekonomi perempuan merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Sementara *pencapaian pendidikan* merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai,

⁵⁸Kabeer dalam Mayoux, Linda, *Gender Equity, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*, (Aga Khan Fondation, Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>, 2001)

⁵⁹Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi, *Woman Empowerment :Measuring the Global Gender Gap*. (World Economic Forum, Diakses dari situs : www.weforum.org, 2005), hlm 2-5

perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik. *Kesehatan dan kesejahteraan* merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.

Unsur-unsur kesejahteraan diatas selaras dengan konsep ekonomi Islam yaitu “kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material”.⁶⁰ Kesejahteraan dalam ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dengan istilah *Al Falah* yaitu kemenangan, keberuntungan. Jika unsur *falah* dalam proses pemberdayaan perempuan dikaitkan dengan indikator kesejahteraan perekonomian rumah tangga muslim, maka seluruh indikator kesejahteraan perekonomian keluarga muslim dapat dimasukkan dalam kategori unsur ini, yaitu berinfak, menabung, kepemilikan, pemberian zakat dan investasi.

2. *Access (Akses)*

Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan

⁶⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 2 – 3

informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia. Jika unsur akses dalam proses pemberdayaan perempuan dikaitkan dengan indikator kesejahteraan perekonomian rumah tangga muslim, maka indikator keberhasilan muslim mempunyai kepemilikan terhadap suatu sumberdaya, dan investasi dapat dimasukkan dalam kategori unsur ini.

3. *Consientisation (Konsientisasi)*

Pemahaman atas perbedaaan peran jenis kelamin dan peran gender. Pemahaman dalam islam disebut juga berilmu. Dalam ayat Al-Qur'an Allah telah menjelaskan tentang ilmu yaitu sebagai berikut:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا^{٦١}

Artinya:

Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, Padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.⁶¹

⁶¹ Qs. An-Nisa': 108

4. *Participation (Partisipasi)*

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka.⁶² Dalam islam salah satu upaya pemberdayaan adalah melalui pemberian zakat, pemberian zakat wajib dilaksanakan bagi seluruh muslim baik laki-laki maupun perempuan, hal ini juga disebutkan dalam salah satu indikator kesejahteraan perekonomian keluarga muslim, maka indikator seorang muslim mampu menyalurkan zakat dapat dimasukkan dalam kategori unsur ini.

5. *Equality of Control (Kesetaraan dalam kekuasaan)*

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan. Dalam Islam posisi perempuan dan laki-laki adalah sama dimata Allah. Allah SWT berfirman.

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا

قِيلَ ائْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

⁶² *Ibid*, hlm 4

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶³

Dalam islam dijelaskan pula bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kuasainya atau yang ia pimpin, hal ini dijelaskan dalam hadist berikut.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radiallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."

⁶³ Qs. Al-Mujadilah: 11

2. Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Status Ekonomi Keluarga

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” Status berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, Negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu, bapak dan anak-anaknya yang merupakan satuan kekerabatan paling mendasar dalam masyarakat.

Status sosial pada ekonomi keluarga dalam masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya. Dalam konteks ini Soerjono Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles “Bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.⁶⁴

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama derajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidak demikian, perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Pada umumnya warga lapisan atas (*Upper-class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*Middle-class*) dan lapisan bawah (*Lower-class*).

⁶⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi sesuatu pengantar, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990) hal 251

b. Aspek-aspek Ekonomi Keluarga

Menurut penjelasan diatas, didalam bermasyarakat terdapat tiga lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

1. Ekonomi keluarga mampu

Marx mengatakan “Selama masyarakat masih terbagi kedalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat kedalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.”⁶⁵

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari di namakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini, dan hal tersebut di anggap sebagai suatu hal yang wajar.⁶⁶

⁶⁵ Soekanto, Sosiologi sesuatuhal 263

⁶⁶ *Ibid*, hal 264

2. Ekonomi keluarga sedang

Status ekonomi yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan didalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan didalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status dibawahnya. Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan status diatasnya disebabkan status ini terlalu banyak dalam masyarakat. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakan adalah tingkat fasilitas yang digunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi yang diatasnya.

3. Ekonomi keluarga tidak mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin), biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga pemukiman masyarakat yang tertinggal.

Ada sejumlah teori yang dikolaborasikan berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial, ringkasnya teori tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu yang berfokus pada tingkah laku individu dan yang mengarah pada struktur sosial. Teori tingkah laku merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia. Pandangan

strukturalis bertolak belakang dengan pendapat tersebut, dan diawali dengan baik oleh teori kelompok Marxis, yaitu “Bahwa hambatan-hambatan structural yang sistematis telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis”.⁶⁷

Singkatnya teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Di sisi lain, teori struktur sosial menyatakan bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu, misalnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sabda Nabi menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.⁶⁸ Agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling berbagi dan membantu satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦٠﴾

⁶⁷ Abad Badruzaman, Lc, m.Ag, *Teologi kaum tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hal 135

⁶⁸ Qadir, Abdurrachman, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 24

Artinya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.⁶⁹

Ayat tersebut mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berada dalam golongan orang kaya saja, namun harus disalurkan ke golongan orang miskin juga, sebab orang yang beriman adalah mereka yang menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak-hak orang lain. Dalam islam salah satu upaya untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat.⁷⁰ Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (*muzakki*) harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau membutuhkan (*mustahiq*). Mengenai ketidaksamaan dalam memperoleh rizki dalam kehidupan telah Allah jelaskan dalam beberapa firmanNya, diantaranya yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَقْسِمَآ بَيْنَهُمْ مَّعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٢١﴾

⁶⁹ Qs. Az-Dzariat: 19

⁷⁰ Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat :Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996)

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁷¹

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.⁷²

3. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

a. Feminisasi

Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan yang diambil oleh perempuan miskin dalam keluarga.⁷³ Peran tersebut meliputi: pertama sebagai pengelola keuangan keluarga, kedua sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan

⁷¹ Qs. Az-Zukhruf: 32

⁷² Qs. An-Nahl: 71

⁷³ Marwati, Astuti, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar*, (Surakarta: Jurnal SEPA Vol 9 No 1, 2011)

domestik, ketiga sebagai pencari nafkah keluarga dan keempat sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis.⁷⁴

Komitmen internasional *United Nation Millenium Declaration* memuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara yaitu: *”to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulate development that is sustainable”*.⁷⁵

Komitmen internasional tersebut menegaskan pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak untuk mengecilkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat spesifik, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang khusus pula.⁷⁶

b. Konsep kemiskinan

Secara teoritik, kemiskinan dipahami melalui akar penyebabnya dibedakan menjadi dua katagori: Pertama. Kemiskinan alamiah, yaitu sesuatu kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya sumber atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan buatan (artifisial), yaitu struktur sosial yang ada membuat masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara

⁷⁴ Basuki, A. & Prasetyo, Y.E, *Memusimkan Kemiskinan*, (Surakarta:PATTIRO Surakarta, 2007)

⁷⁵ Marwati, Astuti, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar*, (Surakarta: Jurnal SEPA Vol 9 No 1, 2011)

⁷⁶ Darwin, M, *Memusiumkan Rakyat:Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*, (Yogyakarta:Penerbit Benang Merah, 2005)

merata.⁷⁷ Faktor-faktor yang membedakan kemiskinan natural dan kultural adalah, jika kemiskinan natural disebabkan oleh keadaan alamiah seperti cacat, sakit, lanjut usia dan bencana alam. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang kurang merata.⁷⁸

Ada tiga pendekatan yang cukup populer dalam memahami kemiskinan yang dikemukakan oleh Ancyk, yaitu: Pertama, pendekatan kultural, dengan konsep *cultural poverty* yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Inilah kemudian dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marginal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. Kedua, pendekatan situasional yang mengasumsikan bahwa masyarakat miskin timbul karena adanya struktur total dari sistem sosial yang ada didalam masyarakat yang menekan mereka (kemiskinan struktural). Ketiga pendekatan interaksional dengan suatu asumsi bahwa sebagian orang miskin diakibatkan oleh warisan generasi sebelumnya dan sebagian yang lainnya hanya miskin secara periodik.⁷⁹

⁷⁷ Mas'ood Moctar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES, 1994)

⁷⁸ Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998)

⁷⁹ Ancyk, Jamaludin, *Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta:Aditiya Media, 1995)

c. Feminisasi Kemiskinan

Feminisasi kemiskinan adalah “pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama”.⁸⁰ Menurut kamus Wikipedia, feminisasi kemiskinan didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyimpang dan menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Feminisasi kemiskinan bisa juga dikenal dengan kemiskinan yang semakin berwajah perempuan.

PBB menganggap kemajuan posisi ekonomi kaum perempuan akan mengalir otomatis seiring terjadinya perluasan dan pelebaran proses pembangunan. Namun, di akhir dekade (pada laporan sepuluh tahunan PBB), justru pembangunan itu sendiri yang menjadi pangkal masalah bagi perempuan. Dan berdasarkan laporan situasi sosial dunia 1997 oleh badan PBB (1997), bahwa dari 1,3 milyar warga dunia yang masuk kategori miskin, 70% nya adalah perempuan.⁸¹

Pemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (i) akses perempuan terhadap pekerjaan: (ii) akses terhadap upah yang sama, (iii) akses pendidikan: dan (iv) beban pekerjaan. Pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai lingkungan mereka dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi

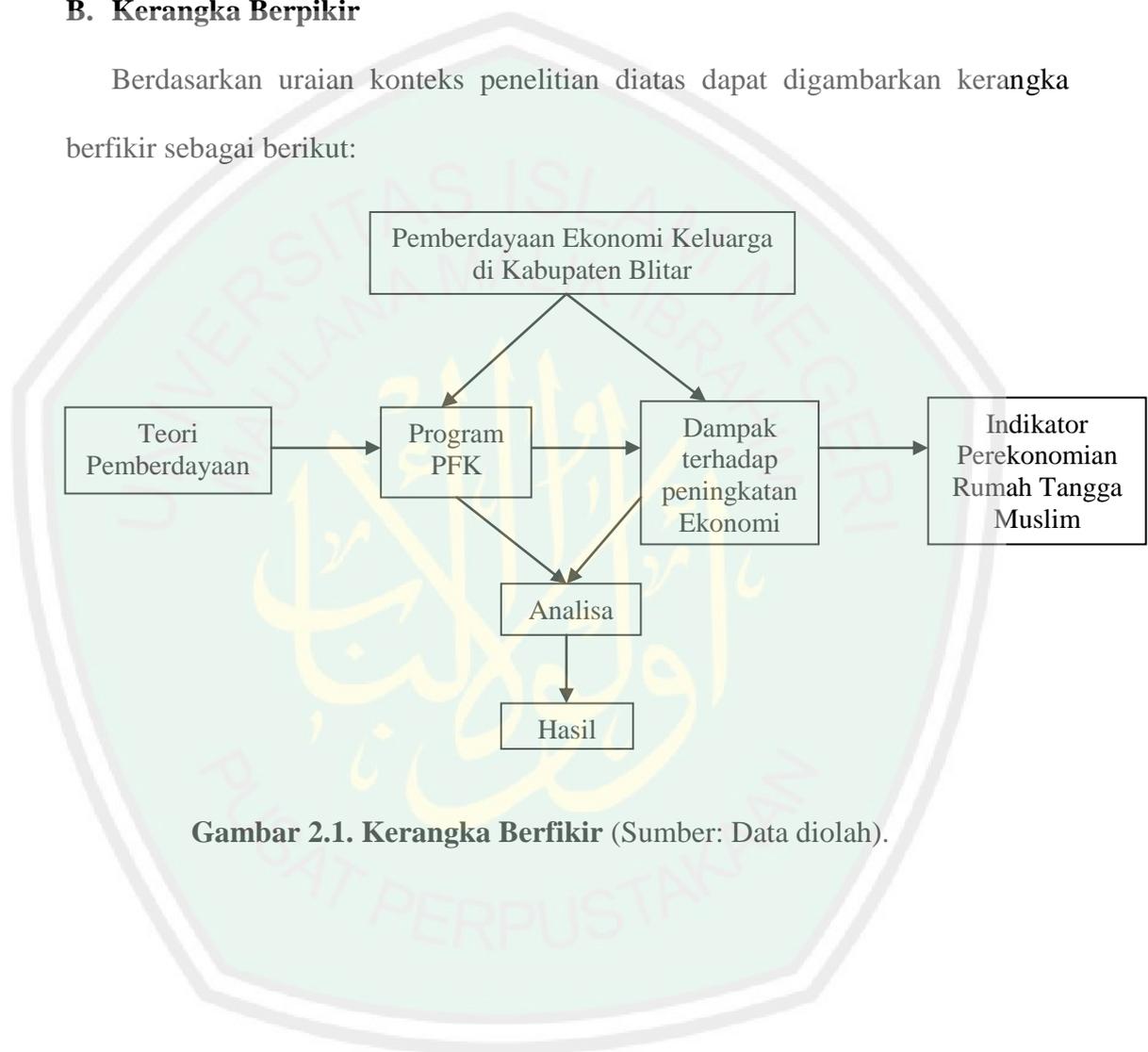
⁸⁰ Valentine, Moghadam, *Globalizing Women: Transnational Feminist Networks*, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005), hlm, 7

⁸¹ Shiva, V & M, Mies, *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan. Terjemahan dari Ecofeminism oleh Kelik Ismunant0 & Lilik*, (Yogyakarta: IRE Press, 2005), hlm, 83

tidak hanya berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.⁸²

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir (Sumber: Data diolah).

⁸² Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi, *Woman Empowerment :Measuring the Global Gender Gap*. (World Economic Forum, Diakses dari situs : www.weforum.org, 2005), hlm 2-5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh).⁸³

Metode penelitian kualitatif sering disebut “metode penelitian naturalist” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); menurut Sugiono metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.⁸⁴ Metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah pendekatan penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenology, dan naratif.⁸⁵

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu,

⁸³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 22

⁸⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif. Cet III*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 1

⁸⁵ John W. Creswell, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm 20

kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Selama tiga dekade, studi kasus telah didefinisikan oleh lebih dari 25 ahli. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan⁸⁶ Studi kasus adalah sebuah penyelidikan empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas.⁸⁷ Studi kasus adalah suatu penyelidikan intensif tentang seorang individu, namun studi kasus terdapat dapat juga dipergunakan untuk menyelidiki unit sosial yang kecil seperti keluarga, sekolah, kelompok-kelompok.⁸⁸

Tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi. Penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang “apa” (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why).⁸⁹

Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus adalah sebagai berikut.⁹⁰

1. Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (purposive) dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Yin, Robert K, *Desain dan Metode*. (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 1

⁸⁸ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta:Erlangga,2009) hlm 57

⁸⁹ Yin, Robert K, *Desain dan Metode*. (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 2

⁹⁰ Ernen Fabru Aries, <https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018

peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia.

2. Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak.
3. Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan.
4. Perbaikan (refinement): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan (reinforcement) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada.

5. Penulisan laporan: laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang atau kelompok.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrument utama (*human instrument*). Oleh sebab itu kehadiran dan keterlibatan peneliti sangat diperlukan karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi sesungguhnya. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.⁹¹ Peneliti bertugas meneliti, mengamati secara mendalam dan membuat kesimpulan akhir.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Blitar, alasan pengambilan lokasi di Kabupaten Blitar karena Blitar merupakan salah satu penyumbang Tenaga Kerja Indonesia terbesar di Jawa Timur, selain itu tingginya angka perceraian di Blitar pada tahun 2015 yang mencapai hingga 4.864 kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama setempat dan dimungkinkan angka tersebut selalu mengalami

⁹¹ Sugiyono. Op.cit., hlm. 17-18

peningkatan tiap tahunnya. Jumlah perceraian di Blitar yang mengakibatkan feminisasi kemiskinan juga didominasi oleh keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia terlebih Tenaga Kerja Wanita.

Peneliti mengambil beberapa desa dari 19 desa yang berada di 4 kecamatan penerima program PFK di Kabupaten Blitar untuk dijadikan sasaran atau lokasi penelitian, penentuan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan dari pendamping kabupaten yang lebih tau lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang disasar di Kecamatan Garum berada di Desa Slorok dan Sidodadi, kedua desa ini memiliki potensi pasar yang cukup strategis jika dibandingkan desa-desa lain penerima program PFK di Kecamatan Garum, selain itu usaha yang dijalankan oleh KRTP penerima program juga beragam. Untuk Kecamatan Gandusari lokasi penelitian berada di Desa Sumberagung dan Sukosewu, kedua desa ini termasuk desa pinggiran yang ada di Kabupaten Blitar, usaha yang dijalankan tidak begitu beragam dikarenakan kondisi alam kedua desa ini sangat menunjang untuk menjalankan usaha peternakan jika dibandingkan dengan usaha perdagangan.

Untuk kecamatan Kanigoro lokasi penelitian berada di Desa Karangsono dimana desa ini merupakan desa yang komoditasnya agrowisata. Dan untuk Kecamatan Selopuro lokasi penelitian berada di Desa Selopuro dimana desa selopuro merupakan desa dengan penerima program PFK terbanyak kedua di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016, lokasi desa ini bisa dikatakan strategis jika dibandingkan dengan desa lain penerima program yang berada di Kecamatan Selopuro.

Dari setiap desa tersebut peneliti mencari tiga informan yang mana dari tiga informan tersebut mampu menggambarkan kriteria keberhasilan pengelolaan program PFK, kriteria tersebut yaitu berjalan atau berkembang, stagnan dan gagal. Jadi jika setiap desa peneliti mengambil tiga informan khusus untuk RTS program maka masing-masing kriteria tersebut digambarkan oleh enam informan di desa yang berbeda.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moeleng sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹²

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer (manusia) dan data sekunder (bukan manusia). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kadin PMD Kabupaten Blitar, Kasi PMD Kecamatan, tenaga pendamping kabupaten, tenaga pendamping desa, Kepala Desa dan KRTP sasaran program. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang mendukung seperti administrasi DPMD Kabupaten, Kepala Desa, tenaga pendamping kecamatan, tenaga pendamping desa dan foto-foto kegiatan yang dapat mendukung data primer.

Menurut Arikunto agar penelitian kualitatif betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku subyek penelitian (informan). Data sekunder berupa dokumen-

⁹² Lexy Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 112

dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lainlain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer.⁹³

Sementara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling*, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *socio gram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus,, dan garis-garis menunjukkan hubungan antara responden atau antar kasus.⁹⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa tehnik *snowball sampling* adalah metode *sampling* dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu.

Dalam *snowball sampling*, identifikasi awal dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan rsgonden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Demikian seterusnya proses *sampling* ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian.

⁹³ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm.21

⁹⁴ Neuman, W.L, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth Edition*. (Boston: Pearson Education, 2003)

Tabel 3.1. Ringkasan teknik *Snowball Sampling*.⁹⁵

Teknik Sampling <i>Snowball</i>	
<u>Deskripsi</u>	<i>Snowball Sampling</i> adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanyai apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapang.
<u>Manfaat</u>	Efektif untuk penelitian yang terkait dengan komunitas yang terselubung, isu-isu yang sulit diungkapkan dengan jelas atau tidak terlihat nyata, isu-isu komunikasi, dan lain sebagainya.
<u>Jumlah orang atau responden awal yang diperlukan</u>	- Medium (2-12 orang)
<u>Ukuran sampel.</u>	- Besar (>30) - Medium (10-30).
<u>Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan</u>	- Medium (6 minggu – 6 bulan). - Pendek (<6 minggu).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.⁹⁶ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁷ Tanpa menguasai dan mengetahui teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang kita butuhkan dan kita inginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Patton (1990); Salganik (2007); Suhardjo (2008) dalam Nina Nurdiani, *Jurnal Teknik Sampling snowball dalam Penelitian Lapangan*, (Jakarta:ComTech vol.5 No.2 Desember 2014), hlm 1114

⁹⁶ Pohan, Rusdian, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute dan Lanarka Publisher, 2007), hlm. 57

⁹⁷ Sugiono, *Kualitatif. Cet III*, hlm. 62

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹⁸ Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁹⁹

Sebelum melaksanakan wawancara, para peneliti menyiapkan instrument wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan focus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.¹⁰⁰ Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:¹⁰¹

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus.

⁹⁸ Sugiono, Kualitatif. Cet III, hlm. 72

⁹⁹ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2011) hlm. 212

¹⁰⁰ Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 216

¹⁰¹ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 270

- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda V (check) pada nomor yang sesuai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

1. Kadin PMD (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Blitar,
2. Kasi PMD (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan,
3. Tenaga pendamping Kabupaten,
4. Kepala Desa sasaran program,
5. Tenaga Pendamping Desa yang mendampingi KRTP, dan
6. KRTP (kepala rumah tangga perempuan) sasaran program PFK.

Berdasarkan sumber data primer diatas, maka dapat dikelompokkan kepada siapa harus dilakukan wawancara terkait tahap-tahap pemberdayaan seperti yang dijelaskan oleh Isbandi Rukminto. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pengelompokan Informan Berdasarkan Tahapan Pemberdayaan (Sumber: Data Diolah)

No	Tahap	Kisi-kisi Pertanyaan	Tujuan Informan
1	Persiapan	Penyamaan persepsi	Kadin PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran program, Tenaga pendamping Desa
		Pendekatan yang dilakukan	
		Penyiapan lapangan (kelayakan daerah sasaran)	
2	Assessment	Bagaimana mengidentifikasi masalah RTS	Kadin PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran program, Tenaga pendamping Desa, KRTP sasaran
		Sumber daya yang dimiliki RTS	
3	Perencanaan Alternatif	Cara mengatasi masalah RTS	Kadin PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran
		Sejauh mana pelibatan masyarakat	

		Alternatif apa yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program & kegiatan	program, Tenaga pendamping Desa, KRTP sasaran
4	Formulasi	Formulasi gagasan	Kadin PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran program, Tenaga pendamping Desa
		Proses/alur penyampaian gagasan kepihak penyandang dana	
5	Pelaksanaan	Bagaimana pengimplementasian rencana	Kasi PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran program, Tenaga pendamping Desa, KRTP sasaran
		Peran masyarakat & fasilitator	
6	Evaluasi	Proses pengawasan terhadap program	Kadin PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran program, Tenaga pendamping Desa, KRTP sasaran
		Pelibatan seperti apa yang dilakukan masyarakat bersama fasilitator	
7	Terminasi	Bagaimana pemutusan hubungan yang dilakukan	Kadin PMD Kabupaten, Kasi PMD Kecamatan, Tenaga pendamping Kabupaten, Kepala Desa sasaran program, Tenaga pendamping Desa, KRTP sasaran

2. Observasi

Sutrisno menerangkan bahwa pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan.¹⁰²

Selanjutnya Spradley dalam Sugiyono membagi observasi partisipan menjadi empat, yaitu:¹⁰³

- a. Partisipasi pasif (*Passive participation*): peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

¹⁰² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hlm. 220

¹⁰³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 226

- b. Partisipasi aktif (*Active participation*): peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.
- c. Partisipasi moderat (*moderate participation*): terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
- d. Partisipasi lengkap (*Complete participation*): peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, di mana dalam observasi partisipasi pasif ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁰⁴

Bugin mengungkapkan bahwa mencatat hasil observasi harus memperhatikan beberapa hal:¹⁰⁵

- a. Waktu pencatatan

Hal terbaik mencatat adalah pada saat objek pengamatan yang diamati tersebut sedang terjadi, atau disebut dengan pencatatan langsung (*on the spot*). Walaupun harus menghadapi kesulitan di atas, tetapi pencatatan *on the spot* masih dianggap sebagai alternatif terbaik karena dapat menghindari bias dan penjumlahan akibat kelupaan, hal ini tentunya tinggal bagaimana

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Burhan, Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenama Media Grup, 2010) hlm 118

pengamat meyakinkan objek pencatatnya tidak berbahaya bagi objek pengamatan.

b. Cara pencatatan

Apabila pencatatan *on the spot* tidak mungkin dilakukan, maka pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata kunci (*key word*). Ini artinya pengamat tetap mencatat pada saat peristiwa berlangsung, tetapi yang dicatat merupakan kata kunci yang nantinya disempurnakan setelah pengamatan berlangsung. Hal ini sedikit mengalami kesulitan bila dibandingkan cara yang pertama, tetapi pengamat tetap dituntut agar memiliki dan menghafal beberapa kata kunci.

c. Mencatat dengan pengamatan

Cara ini adalah alternatif lain yang bisa dilakukan, yaitu pengamat mencatat hasil pengamatan disela-sela objek pengamat tidak dapat direkam kegiatannya. Ini berarti kegiatan pengamat terhenti, dan ini adalah saat yang tepat untuk mencatat hasil pengamatan sementara.

3. Studi dokumentasi

Menurut Danial studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, dsb.¹⁰⁶

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, buku harian, surat pribadi,

¹⁰⁶Danial, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2009), hlm. 79

catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁷

Sementara, kegunaan teknik dokumentasi ini dijelaskan oleh Sugiono sebagai berikut.¹⁰⁸

- a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.
- b. Menjadikan hasil penelitian dari observasi dan wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan dukungan dokumen-dokumen yang terkait dan foto-foto selama penelitian dilakukan.
- c. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, data-data mengenai progam feminisasi kemiskinan serta jumlah kepala rumah tangga perempuan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

4. Studi literatur

Danial dan Warsiah menjelaskan bahwa studi literature adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian". Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang

¹⁰⁷ Prastowo, Metode Penelitian, hlm. 226

¹⁰⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2010), hlm 83.

sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.¹⁰⁹

Dalam penelitian ini studi literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang feminisasi, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat digunakan untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang tidak penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹⁰

Teknik analisis data menggunakan beberapa alur kegiatan, yaitu: 1)reduksi data (data reduction), 2)penyajian data (data display), dan 3)kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing).¹¹¹

¹⁰⁹Danial dan Warsiah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, hlm. 80

¹¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244

¹¹¹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 19

1. Reduksi Data (Data Reduksi)

Menurut Sugiyono, “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”.¹¹²

Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang pelaksanaan program penanggulangan feminisasi kemiskinan di Kabupaten Blitar.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menurut Sugiyono “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya”.¹¹³

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif maka penyajian data bisa berupa bagan dan juga bisa disajikan dalam bentuk uraian. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing)

Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

¹¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 92

¹¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 95)

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹¹⁴

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas).¹¹⁵

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.¹¹⁶

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 99)

¹¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 270

¹¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 276

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.¹¹⁷

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek

¹¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 277

penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁸

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana pengujiannya dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan persepsi seseorang dengan berbagai pendapat
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan

¹¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 278

¹¹⁹ Lexy, Malelong, J. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi*. (Jakarta:Remaja Rosdakarya), hal 330

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan ibu kotanya adalah Kanigoro, secara astronomis Kabupaten Blitar terletak pada $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ BT dan $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$ LS berada di Barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur Surabaya, adapun sebelah utara Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.¹²⁰

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km² dimana sekitar 38,02% merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dpl. Oleh karena di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, maka beberapa kecamatan mempunyai wilayah pantai, yaitu Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto, dan Wates.¹²¹ Berikut peta wilayah Kabupaten Blitar beserta batasan wilayahnya.

¹²⁰ <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-blitar-2013.pdf> pada tanggal 23 mei 2018

¹²¹ *ibid*



Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Blitar

(Sumber: <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-blitar-2013.pdf> pada tanggal 23 Mei 2018)

Secara administratif Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 Kecamatan, terdiri dari 248 desa/kelurahan yaitu, 28 kelurahan dan 220 desa. Berikut data terkait kependudukan Kabupaten Blitar per-kecamatan tahun 2016.¹²²

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2016

Sumber: <https://blitarkab.bps.go.id> pada tanggal 23 Mei 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah Area (Km ²)	Jumlah Penduduk Population (jiwa)	Kepadatan Density (Jiwa/Km ²)
1	Bakung	111.24	25463	229
2	Wonotirto	164.54	35843	218
3	Panggungrejo	119.04	41181	346
4	Wates	68.76	28118	409
5	Binangun	76.79	43381	565
6	Sutojayan	44.2	47664	1078
7	Kademangan	105.28	65103	618
8	Kanigoro	55.55	77040	1387
9	Talun	4978	60519	1216
10	Selopuro	39.29	39978	1018
11	Kesamben	5696	49229	864

¹²² <https://blitarkab.bps.go.id> pada tanggal 23 Mei 2018

12	Selorejo	52.23	35325	676
13	Doko	70.95	38233	539
14	Wlingi	66.36	50861	766
15	Gandusari	88.23	67490	765
16	Garum	54.56	64929	1190
17	Nglegok	92.56	69722	753
18	Sanankulon	33.33	55861	1676
19	Ponggok	103.83	101184	975
20	Srengat	53.98	65059	1205
21	Wonodadi	40.35	46786	1160
22	Udanawu	40.98	40742	994
Kabupaten Blitar		1588.79	1149710	724

Sumber : Proyeksi SP - BPS Kabupaten Blitar

Mayoritas penduduk Kabupaten Blitar memeluk agama Islam, kemudian prosentase selanjutnya diikuti dengan Kristen dan Katolik. Berikut data prosentase penduduk per-Agama Kabupaten Blitar tahun 2016.¹²³



Gambar 4.2

Data Prosentase Penduduk Per-Agama Kabupaten Blitar tahun 2016
(Sumber: <https://blitarkab.bps.go.id> pada tanggal 23 Mei 2018)

¹²³ <https://blitarkab.bps.go.id> pada tanggal 23 Mei 2018

B. Paparan Data Penelitian

1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non-ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin di capai.¹²⁴

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) merupakan salah satu program Jalin Matra (jalan lain menuju mandiri dan sejahtera) yang digagas oleh pemerintah Jawa Timur tahun 2015-2019 untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi dimana sasaran program ini adalah rumah tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (desil 1) berdasarkan PPLS 2011 yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang memiliki anggota rumah tangga produktif dengan usia antara 15-65 tahun.¹²⁵

Berdasarkan wawancara peneliti terkait program Jalin Matra dan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ada beberapa pemaparan diantaranya adalah:

¹²⁴ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta:Adiyana Press, 2000), hal 1-2

¹²⁵ Pemprov Jatim, *Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 2016*, hal 16

Terkait Jalin Matra ini nampaknya program yang luar biasa bagusnya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan apalagi pada situasi saat ini. Kan ada yang feminisasi, yang artinya kepala keluarga perempuan yang rawan ketika mereka harus menghidupi anak-anaknya. Kalau rentan miskin kan bisa terjadi karna gejolak sosial, peperangan, acara ritual keagamaan yang biasa masyarakatnya menyambut dengan segala hiruk pikuknya, misalnya idul fitri barang-barangan semua naik harganya, sehingga program ini tepat sekali. Lantas kenapa kok Blitar dapat bantuan feminisasi itu karna di blitar itu kan banyak menyumbang TKI luar negeri yang cukup banyak, sehingga ya suaminya pergi tapi pernikahan ndak jelas dan sebagainya, jadi belum tentu janda, hampir atau bagaimana, punya suami tapi suaminya tidak menghidupi inikan rentan, rentan untuk jatuh ke garis kemiskinan.¹²⁶

Kenapa kita pilih Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) itu ada sejarahnya juga, kalau kita ulas lagi kemiskinan di Jatim itu lebih besar perempuan daripada laki-laki, mbak lihat statistik dimanapun bisa dilihat kemiskinan di Jatim itu mesti lebih besar perempuan daripada laki-laki, itu sesuai dengan latar belakang program kita itu ya seperti itu.¹²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pemerintah Provinsi Jawa Timur menggalakkan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dikarenakan kantong kemiskinan di Jawa Timur lebih didominasi oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan, sensus penduduk tahun 2010 di Jawa Timur menunjukkan bahwa 50,63% (18,97 juta) penduduk di Jawa Timur lebih didominasi oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki yang persentasenya 49,37% (18,5 juta). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada bulan Juli 2012 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 30% terendah di seluruh Indonesia yaitu

¹²⁶ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Mujiyanto, *Wawancara* (Blitar, 2 Mei 2018)

¹²⁷ Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

sebanyak 2.864.364. Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan sebanyak 700.160 atau 24,4%.¹²⁸

Faktor yang menyebabkan rumah tangga menjadi miskin diantaranya adalah kasus perceraian yang menyebabkan perempuan mengambil alih tugas laki-laki sebagai kepala rumah tangga dimana perempuan jauh lebih rentan miskin daripada laki-laki dikarenakan perempuan harus memikul sendiri beban ekonomi dan rumah tangga secara bersamaan, salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah ketika suami selaku kepala keluarga bekerja sebagai TKI atau sebaliknya, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten penyumbang TKI yang cukup besar di Jawa Timur.

Berbicara tentang Jalin Matra khususnya PFK, dalam pelaksanaannya pemerintah mempunyai tahapan-tahapan untuk kegiatan tersebut, berikut hasil wawancara peneliti tentang tahap awal yang dilakukan dalam kegiatan penanggulangan feminisasi kemiskinan.

Pertama kita sosialisasikan program, mulai dari kabupaten kita sudah difasilitasi oleh DPMD karna leading sektornya kita ikut DPMD, dari DPMD kita difasilitasi untuk sosialisasi ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, setelah itu selesai baru kita langsung terjun ke desa mulai dari awal tahap persiapan kitakan otomatis ada data untuk sarannya, dari data itu kemudian kita koordinasikan dengan perangkat desa setempat sesuai dengan PTO dan PEDOM soalnya kita dari profinsi juga ada pedom dan pto untuk melangkah kita kedepan, jadi kalau kita jalan kita ada dasarnya, baru setelah kita koordinasi dengan desa kita langsung ke teknis. Teknis kalau sesuai pedom dan pto diawal kita perkenalan dan selanjutnya kita ke rembuk warga, dari rembuk warga disitu kita ngumpulkan masyarakat dan perangkat desa fungsinya kita memilah dan memilih sasaran yang kita data kemarin, jadi data RTS yang diberikan ke kita itu pasti ada perubahan secara ekonomi karna kita pakai data 2011 kalau yang untuk 2016 yang berarti kan ada kurun waktu lima tahun pastinya ada perubahan.¹²⁹

¹²⁸ Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 4

¹²⁹ Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan fasilitator dalam tahap awal ini cukup panjang, kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu sosialisasi provinsi, sosialisasi kabupaten, pra rembug warga dan rembug warga dimana untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan feminisasi kemiskinan ke empat kegiatan tersebut tidak bisa ditinggalkan salah satunya, sosialisasi provinsi hingga desa dilakukan untuk menyamakan persepsi antar petugas satu dengan yang lainnya agar tidak ada pemahaman yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan PFK ini.

Sebelum program PFK sampai pada tataran paling bawah yaitu desa, pendamping kabupaten terlebih dahulu harus mensosialisasikan program tersebut kepada camat dan atau kasi PMD kecamatan yang bersangkutan terkait program beserta tugas dari camat dan atau kasi PMD yang bersangkutan, berikut hasil wawancara terkait tugas dan peran pendamping kecamatan:

Pedamping kecamatan tugasnya dalam bentuk fasilitasi, kalau misalnya ada bimtek untuk kepala desanya atau untuk pendampingnya kan melalui kecamatan. Jadi kecamatan hanya memfasilitasi, misalnya bersentuhan langsung juga endak, yang bersentuhan langsung ya kepala desa.¹³⁰

Saya ikut sosialisai di tingkat kabupaten, rapat bersama kades, sosialisai ke desa, musdes-musdes diawal yang bermacam-macam itu, Cuma secara detail saya tidak ikut, kan sudah ada pendamping, selain pendamping tingkat desa di tingkat kabupaten juga ada, jadi kita kalau ada pertemuan-pertemuan tidak dikasih tau kan kita juga ndak tau.¹³¹

Sedangkan kegiatan pra rembug warga dan rembug warga merupakan salah satu forum pendekatan yang dilakukan fasilitator kepada kepala rumah tangga perempuan sasaran, dimana dalam kegiatan pra rembug dan rembug warga

¹³⁰ Pendamping Kecamatan Selopuro, Ibu Anik, *Wawancara* (Blitar, 2 Mei 2018)

¹³¹ Pendamping Kecamatan Gandusari, Ibu Istiqomah, *Wawancara* (Blitar, 25 April 2018)

tersebut fasilitator kecamatan hingga desa berkumpul dan duduk bersama dengan kepala rumah tangga perempuan sasaran. Kegiatan pra rembug dan rembug warga yang dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab kepala desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan di tingkat paling bawah, berikut hasil wawancara yang menunjukkan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan persiapan tersebut.

Yang pertama-tama membuat kepanitiaan di tingkat desa, ada ketua, bendahara dan anggota. Selaku kades selalu membimbing, mengarahkan dan sebagainya agar jangan sampai salah sasaran, Ternyata disini tidak ada yang salah sasaran.¹³²

Kami sebagai kades sebelumnya mendata janda-janda yang ada di karangsono ini yang mempunyai tanggungan untuk dijadikan sasaran, yang jelas kita survey sungguh-sungguh.¹³³

Sebelum program tersebut turun saya bersama kasun sudah terjun kelapang untuk melakukan pendataan siapa saja warga saya yang berstatus janda.¹³⁴

Hal tersebut selaras dengan pernyataan KRTP sasaran sebagai berikut:

Sebelum menerima program bantuan itu saya disurvey mbak, ada bu yanti (selaku pendamping desa) dan ada juga dari perangkat desa.¹³⁵

Tahap selanjutnya yaitu assesment atau pengidentifikasian masalah yang dirasakan RTS dan sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh RTS, setelah proses identifikasi selesai selanjutnya dilaksanakan kegiatan perencanaan alternatif dimana dalam tahap ini dilakukan pembentukan kelompok-kelompok dan dilakukan pendalaman tentang apa saja yang diperlukan oleh RTS. Berikut hasil wawancara peneliti terkait hal tersebut.

¹³² Kepala Desa Sukosewu, Bapak Mardi Basuki, *Wawancara* (Blitar, 25 April 2018)

¹³³ Kepala Desa Karangsono, Bapak Muh Nur, *Wawancara* (Blitar, 2 Mei 2018)

¹³⁴ Kepala Desa Selopuro, Bapak Sifaunida, *Wawancara* (Blitar, 10 Mei 2018)

¹³⁵ KRTP Desa Sidodadi, Ibu Marpiah, *Wawancara* (Blitar, 26 April 2018)

Jadi kita fokusnya RTS KRTP yang masih produktif artinya yang masih punya tanggungan anak, jadi kembali ke rembug warga tadi kita fungsinya verifikasi masih layak atau tidaknya dari data yang dikasih ke kita dari BPS tahun 2011, kalau mungkin di tahun 2016 itu tidak layak masih memungkinkan untuk mengganti dari penduduk setempat sesuai tahapan yang ada. Ada kriteria ketidaklayakan termasuk RTS yang sudah menikah itu gugur menjadi penerima, kenapa tidak layak karena menikah secara otomatis sudah ada yang menanggung secara ekonomi, yang kedua meninggal dunia, bisa diahli wariskan selama ahli warisnya juga KRTP dalam artian tidak memiliki suami, yang ketiga pindah alamat, dan menolak, ada juga yang memungkinkan untuk menolak meskipun persentasenya satu dibanding seratus, alasan menolak biasanya disebabkan karena mereka takut, mereka dikasih bantuan nanti takut di cek, yang namanya bantuan pemerintah nntinyakan di cek.¹³⁶

Dari tahap rembug warga kita kan hanya memverifikasi mana yang layak dan yang tidak, setelah tahapan rembug warga kemudian kita ada tahapan lagi yaitu rembug pokmas, misalkan saya ambil contoh di Desa Sidodai seingat saya ada 47 KRTP dimana per KRTP menerima bantuan 2.500.000, dari 47 KRTP kemudian kita bentuk menjadi 3 kelompok masyarakat dengan 3 pendamping desa, masing-masing pendamping desa nanti menyesuaikan jumlahnya ada yang 15 ada yang 16 porsinya, fungsinya rembug pokmas itu pemetaan potensi usaha dan juga potensi secara SDMnya, jadi kita bisa memetakan usaha apa yang sesuai dengan kemampuan KRTPnya, selain itu di rembug pokmas kita juga bisa merifew usulan kebutuhan usaha sekaligus kita pemetaan potensi wilayah dan juga pemetaan skill atau sdm masyarakatnya, jadi disitu pasti berfariatif, kalau bicara tentang refiew kebutuhan usaha hal pertama yang kita lakukan yaitu kita petakan dulu kemampuan dari penerima, misalkan penerima kita basiknya itu seorang petani atau tukang kebun, kita tawarkan minta apa, kalau RTSnya itu minta yang tidak sesuai dengan kemampuannya pasti kita tunda karna bisa dikatakan nanti tidak akan berkembang, jadi kita sesuaikan dengan profesinya, kita hanya memberi masukan misalkan letak profesi si A itu meskipun si A itu seorang petani kalau letak rumahnya atau domisilinya dekat pasar misalkan nanti masih bisa kita kasih masukan disitu masih memungkinkan untuk membuka usaha kecil seperti jualan bakso atau gorengan, saya kira dengan nominal 2,5 masih mencukupi untuk kebutuhan dan sarana prasarananya, tapi kalau memang KRTPnya itu tidak bisa atau tidak mau ya kita tidak bisa memaksakan dan kita juga tidak memaksakan karna kita membantukan tidak harus memaksa.¹³⁷

¹³⁶ Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

¹³⁷ Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

Kalau mau usaha, usaha apa yang diinginkan beliau-beliau sendiri yang akan menyampaikan, misalnya dagang bakso, saya kira dengan 2.500.000 itu mungkin akan saya belikan dandang, kemudian saya butuh sepeda ontel untuk membawa, kemudian saya butuh bahannya berapa, jadi yang pertama sesuai dengan keahlian kemudian yang ke dua adalah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan, atau mungkin lebih lagi kalau kita bisa mentelaah secara pasti ada beberapa orang yang belum punya usaha tapi dia susah menentukan kira-kira mau berusaha apa, kita dari pendamping dan desa harus mencari usaha apa yang pas dan tepat untuk yang bersangkutan, sudah tidak punya keahlian kemudian kalau mau usaha dagang tempat tinggalnya tidak memungkinkan, itu kita harus mencari solusi, mungkin bisa dilatih membuat keset kain itu nah itu kita juga harus memikirkan kira-kira pasarnya dimana, jadi berkaitan dengan penyusunan kebutuhan semuanya pasti sesuai dengan keinginan KRTP itu yang pertama, pertimbangan kedua yaitu sesuai dengan kemampuan usahanya, kalau misalnya basisnya ternak ya kita tidak akan paksa untuk ketrampilan yang lain, ndak biasa dagang kita minta dagang susah nantinya,¹³⁸

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian dengan cara memferifikasi ulang data penerima yang di drop dari pemerintah provinsi lewat forum rembug warga, pemferifikasian dilakukan *by name by adres* oleh pendamping desa didampingi pendamping kabupaten yang bekerjasama dengan perangkat desa, dalam tahap ini ada kemungkinan terjadi pergantian data untuk penerima bantuan penanggulangan feminisasi kemiskinan, pergantian data tersebut dikarenakan beberapa faktor dan alasan diantaranya yaitu: kepala rumah tangga perempuan sudah menikah lagi sehingga perekonomian keluarganya sudah ada yang menanggung, kepala rumah tangga perempuan sasaran sudah mengalami peningkatan dalam perekonomiannya, kepala rumah tangga perempuan sudah meninggal atau telah pindah alamat, dan ada kemungkinan kepala rumah tangga perempuan sasaran menolak menerima bantuan tersebut. Berikut hasil wawancara terkait siapa saja pelaksana kegiatan dalam pemferikasian data yang di drop dari pemprov :

¹³⁸ Pendamping Kabupaten, Bapak Anam, *Wawancara* (Blitar, 21 April 2018)

Proses verifikasi data yang melakukan saya selaku pendamping desa bekerjasama dengan perangkat terutama kasun yang lebih tau, ada yang sudah menikah, ada yang meninggal, akhirnya kita kerjasama dengan pak RT, pak kasun sama kader untuk melakukan muswarah kecil-kecilan bersama orang-orang tersebut sebaiknya siapa yang lebih membutuhkan. Proses perubahan yang diganti-ganti itu mas zen selaku pendamping dari kabupaten juga mendampingi.¹³⁹

Yang tidak layak seperti yang sudah menikah ya tidak jadi dikasih, penggantinya siapa dirembukkan di desa, ditingkat dusun, ke pak lurah, ke pak kasun, pak RT, tidak bisa langsung nunjuk-nunjuk, rawan mbak. Waktu itu banyak yang diganti, tapi tidak ada 50%, meskipun sudah tua tapi tetap dikasih, yang diganti hanya yang menikah kebanyakan, kan itu KRTP saratnya harus pakai KK, jadi yang sudah bersuami ya ndak dapat.¹⁴⁰

Setelah proses verifikasi data, kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kelompok masyarakat dan pendalaman kebutuhan kepala rumah tangga sasaran yang difasilitasi langsung oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten, pembentukan kelompok masyarakat ini didasarkan atas kesamaan variasi usaha yang akan dilaksanakan oleh kepala rumah tangga perempuan atau berdasarkan kedekatan lokasi penerima.

Hal ini selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa pembentukan pokmas memang didasarkan atas kedekatan lokasi KRTP satu dengan KRTP lainnya, hal ini bertujuan memudahkan pendamping desa untuk memantau keberlangsungan usaha yang dijalankan KRTP tersebut.

Setelah dibentuk kelompok-kelompok dengan diketuai salah satu KRTP sasaran program dan didampingi langsung oleh satu pendamping desa dilakukan pendalaman kebutuhan KRTP dimana pendalaman kebutuhan ini disesuaikan

¹³⁹ Pendamping Desa Sidodadi, Ibu Yanti, *Wawancara* (Blitar, 26 April 2018)

¹⁴⁰ Pendamping Desa Suberagung, Ibu Tami, *Wawancara* (Blitar, 29 April 2018)

dengan keinginan dan kemampuan penerima program, apabila dalam pendalaman kebutuhan ini KRTP sasaran mengalami kesulitan dalam menentukan usaha apa yang akan dijalankan maka pendamping desa dan pendamping kecamatan bertugas untuk mengarahkan KRTP tersebut dengan berbagai pertimbangan yang ada, namun dalam pembentukan pokmas ini terdapat beberapa kendala yang salah satunya tergambar dalam potongan wawancara berikut:

Waktu itu saya cari pengurus dimana rata-rata ya identik dengan pendidikan rendah, pengurus itu kan harus ada sekretaris dan bendahara dalam pokmasnya itu, saya sampai istilahnya kesulitan, yang bisa ttd untuk buka rekening di bank samapai kesulitan.¹⁴¹

Hasil wawancara tersebut selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti dilapang yang menunjukkan bahwa ada beberapa desa yang mana penerima program PFK tersebut kebanyakan berusia lanjut sehingga hal tersebut akan menyulitkan pendamping desa dalam beberapa hal yang terkait dengan administrasi yang berhubungan langsung dengan penerima program, misalnya tandatangan atau pembukaan rekening pokmas yang harus dikelola sendiri oleh pokmas tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu formulasi aksi dimana pendamping desa mendampingi KRTP sasaran menuangkan ide atau gagasannya dalam pembuatan proposal, dalam hal ini pembuatan proposal sepenuhnya dilaksanakan oleh pendamping desa namun ide yang diangkat sepenuhnya dari KRTP sasaran, pembuatan proposal ini sepenuhnya dikerjakan oleh pendamping desa dikarenakan tidak memungkinkannya pembuatan proposal ini jika dilaksanakan

¹⁴¹ Pendamping Desa Sukosewu, Ibu Siti Masitoh, *Wawancara* (Blitar, 28 April)

oleh KRTP sasaran sesuai dengan gambaran kondisi KRTP sasaran program pada hasil wawancara diatas.

Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dimana tahap pelaksanaan bisa dilaksanakan setelah bantuan dari pemerintah provinsi telah dicairkan kepada kepala rumah tangga perempuan. Pelaksanaan pencairan bantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa berbeda, apabila mengacu pada peraturan pusat yang seharusnya pencairan bantuan dilaksanakan dalam dua termin, namun dalam pelaksanaannya ada sebagian pemerintah desa yang menyalurkan bantuan ini dalam satu termin atau dalam waktu yang berbeda antar KRTP satu dengan yang lainnya dalam rangka efisiensi waktu, menghindari kecemburuan sosial antar penerima dan menghindari terjadinya hutang antara pemerintah desa selaku pihak yang membelanjakan dana tersebut dengan penjual barang modal. Berikut wawancara peneliti dengan beberapa nara sumber yang berkaitan dengan hal tersebut:

Pencairannya itu sebenarnya dari sana dianjurkan dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap 1 tahap 2. Tahap 1 berupa barangnya itu yang tahap 2 berupa modal usaha.¹⁴²

Pencairannya dulu seharusnya dilaksanakan dua kali, seharusnya dari dana 2.500.000 direalisasikan begini, misalnya 1.500.000 dulu baru yang 1.000.000. Tapi dulu tidak saya buat seperti itu kesepakatan kita buat fleksibel saja, yang datang 5 ini misalnya untuk 5 orang ini saja dulu dicukupkan, yang kedua 5 orang, jadi saya ke penjual kambing juga ndak pnya hutang, saya tanya ibu penerimanya kepingin kambing yang bagaimana, misal minta yang putih yang anak sama induknya, ada yang sepasang, aturannya memang 2 kali, pertama diterimakan 1.500.000 semua rata baru yang kedua baru diterimakan pelunasannya 100% kan begitu, tapi disini dulu dibuat 1.500.000x46 kita cukupkan untuk beberapa orang

¹⁴² Pendamping Desa Selopuro, Ibu Rina, *Wawancara* (Blitar, 23 April 2018)

tapi dilunaskan, kan jaraknya juda ndak lama, jadi saya ndak punya hutang ke penjual kambing.¹⁴³

Meskipun pencairan bantuan JM PFK ini ada yang terbagi dalam satu dan dua termin, penyaluran bantuan ini tidak dibebankan biaya administrasi apapun kepada KRTP sasaran, jadi bantuan dari pemprov senilai 2.500.000 sepenuhnya diterima kepada KRTP sasaran yang didalamnya terdapat prosentase-prosentase pembagian yang ditentukan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk kebutuhan modal usaha, usaha pendukung dan kebutuhan pokok. Keterangan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut.

Untuk admisnitration itu ada sendiri mbak, SOP nya ada sendiri, jadi untuk penerima JM itu sebesar itu. Untuk honor pendamping, administrasi perkantoran itu juga ada, baik muspika, jadi uang 2.500.000 itu murni untuk penerima itu dengan catatan menerimanya berupa barang.¹⁴⁴

Ada pembagian prosentasenya, artinya untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan usaha itu 70% dari 2,500.000. Misalkan untuk usaha dagang sayur, nanti untuk kebutuhan usaha dagang sayur tersebut minimal 70% walaupun 100% juga ndak masalah, cuma kita juga ada opsi misalkan dia mau punya usaha pendukung ambil contoh karang kitri atau usaha ternak kecil-kecilan itu ada anggarannya sekitar 15-20% untuk usaha pendukung dan maksimal 10% untuk kebutuhan pokok, jadi misalkan KRTP itu memang benar-benar membutuhkan untuk sembako kita ada prosentase 10% maksimal untuk dikonsumsi. Jadi 70% untuk modal, 10% untuk kebutuhan pokok 20% untuk usaha pendukung.¹⁴⁵

Dalam realisasinya pembagian prosentase tersebut berbeda kebijakannya di setiap desa, hal tersebut tercermin dalam wawancara dibawah ini.

Dari bantuan 2.500.000 itu semua permodalan termasuk kambing kita hargakan atau kita batasi 2.200.000 dan sisanya 300 kita terimakan tunai untuk perbaikan kandang atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁴⁶

¹⁴³ Pendamping Desa Sukosewu, Ibu Siti Masitoh, *Wawancara* (Blitar, 28 April 2018)

¹⁴⁴ Perwakilan Kades Sidodadi, Bapak Solikin, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

¹⁴⁵ Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

¹⁴⁶ Pendamping Desa Sukosewu, Ibu Siti Masitoh, *Wawancara* (Blitar, 28 April 2018)

Bantuan sebesar 2.500.000 itu sepenuhnya untuk modal, pokoknya yang boleh dipergunakan untuk sembako hanya 200.000 saja.¹⁴⁷

Setelah bantuan tersebut diterimakan kepada KRTP sasaran, dalam tahap pelaksanaannya KRTP akan mengimplementasikan ide atau gagasannya kedalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang perekonomian keluarganya, berikut hasil wawancara peneliti tentang pengimplementasian bantuan setelah dicairkan kepada KRTP.

2016 kita kan bantuannya berupa uang, jadi yang belanja nantinya KRTP sendiri atau pengelola usahanya, misalkan pengelola usahanya anaknya berarti yang melakukan pembelanjaan anaknya didampingi pendamping desa, jadi yang belanja KRTP sendiri sesuai dengan yang diminta, nota kwitansi nantinya dikumpulkan menjadi satu dan kita simpan di desa untuk dijadikan bukti peng LPJan kita, karna setiap pembelanjaan uang Negara nanti kita dimintai bukti.¹⁴⁸

2.500.000 itu langsung di plot ke warga berupa barang, warga diajak belanja, mau dibelanjakan apa saja uang itu. Kita meminimalisir kalau warga meminta dalam bentuk uang, misalkan warga pengen beli kambing, pengen belanja barang untuk dagangan, ya langsung dibelikan dagangan, dia langsung dapat barang. Dia diajak belanja yang mau dibeli apa saja dari uang sekian itu, kalau mau kambing ya dibelikan kambing, kalau misalkan belanja barang untuk jalan sayur ya dibelikan barang tersebut, kan enak.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa KRTP mempunyai peran penting terhadap pengimplementasian rencana usaha yang telah disepakati sebelumnya karena pembelanjaan untuk mendukung usaha yang akan dilaksanakan dilakukan sendiri oleh KRTP atau pelaku usaha didampingi langsung oleh pendamping desa, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas KRTP untuk mengembangkan kapasitas diri dalam pengembangan usaha yang akan dijalankannya, pembelanjaan ini harus

¹⁴⁷ Kepala Desa Sumberagung, Bapak Sumiadi, *Wawancara* (Blitar, 25 April 2018)

¹⁴⁸ Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

¹⁴⁹ Pendamping Kecamatan Kanigoro, Ibu Sri Haryanti, *Wawancara* (Blitar, 27 April 2018)

dilakukan bersama dengan pendamping desa untuk mempermudah pengawasan alokasi anggaran yang diberikan dipergunakan secara tepat atau tidak. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara berikut:

Pembelajaan bantuannya dulu ibu-ibunya disuruh nyari sendiri, belanja sendiri, nanti tinggal menyerahkan bukti pembelanjannya.¹⁵⁰

Saya dulu disuruh milih-milih sendiri sepeda yang saya butuhkan, diantar ke toko sepeda sama bu siti.¹⁵¹

Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, tahap ini merupakan salah satu proses pengawasan yang dilakukan fasilitator bersama dengan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan, berikut wawancara peneliti terkait tahap ini dalam kegiatan penanggulangan feminisasi kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Mulai dari pencairan sampai selesai program kita harus monitoring ke RTS masing-masing, dari monitoringpun tidak mungkin kita monitoring semuanya, kita sampling saja misalkan 50% dari 30 KRTP nanti kita hanya kunjungan ke 15. Kalau ngomong monitoring dan sampling terkdang masyarakat itu tidak mau ngomong apa adanya, padahal kita juga tidak mempermasalahkan seandainya itu dikatakan tidak berhasil, dari sampling yang sudah-sudah rata-rata dari 30 dikatakan berhasil dengan fersi kita yang dia punya modal sekian terus modalnya muter barangnya nambah ada pertambahan nilai dan pertambahan modal itu sudah kita angap berkembang, ada juga yang tetap atau tidak berkembang cuma juga tetap berjalan (stagnan), kalau kita ngomong kambing, kambingkan setelah sebulan dua buan setelah kita kasih kan belum tentu sudah beranak itu bisa kita katakana stagnan masihan, yang sudah-sudah kalau usahanya berupa umkm atau jualan relatif berkembang dripada usahanya ternak, meskipun ternak pada akhirnya dirawat dan berkembang namun kurun waktunya agak lama, jadi menurut yang sudah-sudah bantuan ternak itu habis dan hilang, setelah dikasih habis kemudian dijual lagi, tapi pegalaman di kita karna yang kita bantu itu janda mereka tidak brani menjual, baiknya di kita seperti itu, karna rumahnya mereka itu lebih mudah mencari pakan daripada mereka berjualan ada juga yang cocok minta kambing dan mereka sendiri yang mecari pakan, ketika kita kunjungi relatif barangnya masih ada dan tidak brani menjual, tidak brani menjual entah karna takut atau memang itu modal buat mereka yang nntinya mereka harapkan bisa

¹⁵⁰ Kepada Desa Sukosewu, Bapak Mardi Basuki, *Wawancara* (Blitar, 25 April 2018)

¹⁵¹ KRTP Desa Sukosewu, Ibu Sri, *Wawancara* (Blitar, 18 Mei 2018)

beranak dan anaknya bisa diual yang nntinya bisa dijadikan modal, kalau kebutuhan orang laki-laki kan ya dijual saja untuk makan.¹⁵²

seharusnya kita monitoring 3 kali pasca realisasi, istilahnya kita monev realisasi artinya kita ngecek bantuan yang diminta sudah sesuai belum dengan RAB yang mereka minta, kemudian kita ada monitoring perkembangan usaha untuk menentukan tingkat keberhasilan cuman dalam tempo waktu 1 sampai 2 bulan dari penyerahan atau realisasi saya kira belum maksimal untuk bisa dikatakan berhasil, yang ketiga biasanya kita monitoring mendampingi dari dinas provinsi dan merkapun biasanya juga sampling, jadi kita hanya 3 kali monitoring dari tahapan realisasi sampai pasca realisasi.¹⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa monitoring yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pendamping kabupaten tetapi juga dilakukan oleh seluruh instansi yang terakait seperti pemerintah provinsi sendiri juga ikut terjun kelapang untuk melihat sejauh mana perkembangan program PFK yang telah dikururkan kepada KRTP, hal tersebut selaras dengan pernyataan yang berbeda-beda dari hasil wawancara berikut:

Waktu itu ada peninjauan atau monitoring dari provinsi, langsung ke KRTP sasaran, di Desa Selopuro kan ada 3 kelompok, tiga kelompok itu dimintai satu-satu KRTP semua, jadi acak namanya.¹⁵⁴

Peninjauan dari pendamping kabupaten sudah pernah, langsung meninjau ke KRTP sasaran, mereka minta yang usaha masih beralan dan yang sudah berhenti, ya saya antar kerumahnya, dimana usahanya, juga didokumentasikan juga, kan ada yang jualan disini tapi rumahnya disana, ya saya antar kerumahnya juga, kalau peninjauan atau monitoring kabupaten jatuhnya kebetulan ndak didesa sini, daerah Gandusari kalau ndak salah. Waktu itu memang saya punya inisiatif sendiri untuk meninjau KRTP yang pernah dapat bantuan itu, apalagi kan saya juga sebagai istrinya pak wo, kalau warganya dapat bantuan seperti ini bagaimana, apakah ada peubahan apa endak, saya juga pengen tau perkembangan usaha orang-orangnya bagaiamna.¹⁵⁵

¹⁵² Pendamping Kabupaten, Bapak Zen, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

¹⁵³ *idem*

¹⁵⁴ Kepala Desa Selopuro, Bapak Sifaunida, *Wawancara* (Blitar, 10 Me 2018)

¹⁵⁵ Pendamping Desa Sidodadi, Ibu Yanti, *Wawancara* (Blitar, 26 April 2018)

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa pendamping desa selalu melakukan monitoring terhadap usaha yang dijalankan oleh KRTP sasaran meskipun monitoring yang dilakukan pendamping tersebut bersifat tidak formal.

Monitoring yang dilaksanakan oleh pendamping kabupaten atau pemprov dilakukan secara acak atau sampling, dalam kegiatan monitoring tersebut dirasa belum maksimal atau kurangnya waktu perpanjangan waktu monitoring yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program, paparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

lemahnya dari program ini itu tidak ada pendampingan secara intens ditingkat penerima, cumakan kami bisa juga mengontrol, ya ketika waktu ada silaturahmi ke masyarakat, oh ternyata kambingnya masih ada, oh ternyata tidak ada, ya seperti itu sebatas pengawasan yang kita laksanakan.¹⁵⁶

Waktu itu ada peninjauan dari Pemprov langsung ke sasaran tapi cuma diambil 10, otomatis kan ya dipilih yang lancar-lancar saja, memang pada waktu itu kan selang waktunya belum lama dari pencairan, jadi semua masih berjalan lancar, umpama jualan sayuran ya bahan-bahannya masih lengkap, kalau sekarang musim ke sawah begini ya surut, kadang ya habis.¹⁵⁷

Tahap terakhir dalam pemberdayaan yaitu terminasi atau pemutusan hubungan secara formal antara pemberi dan penerima dana, berikut wawancara peneliti terkait terminasi yang dilakukan dalam program ini.

Hari ini sebagai pendamping kita menggagas yang namanya berjejaring, kita buat wadah, beberapa usaha kita wadah di mothercare jatim atau di jarik lurik kita posting-posting produk mereka kita bantu asalkan produk-produk mereka yang kita nilai cukup layak untuk dipasarkan, yang kedua kita juga membukakan akses kepada lembaga-lembaga sosial, mungkin yang kesulitan anaknya sekolah mungkin bisa dibantu lewat laziz atau yatim mandiri dsb, kalau kita punya koneksi kita punya akses kita tawarkan ke mereka, jadi begitu. Kita punya fungsi sosial, mereka yang

¹⁵⁶ Perwakilan Kades Sidodadi, Bapak Solikin, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

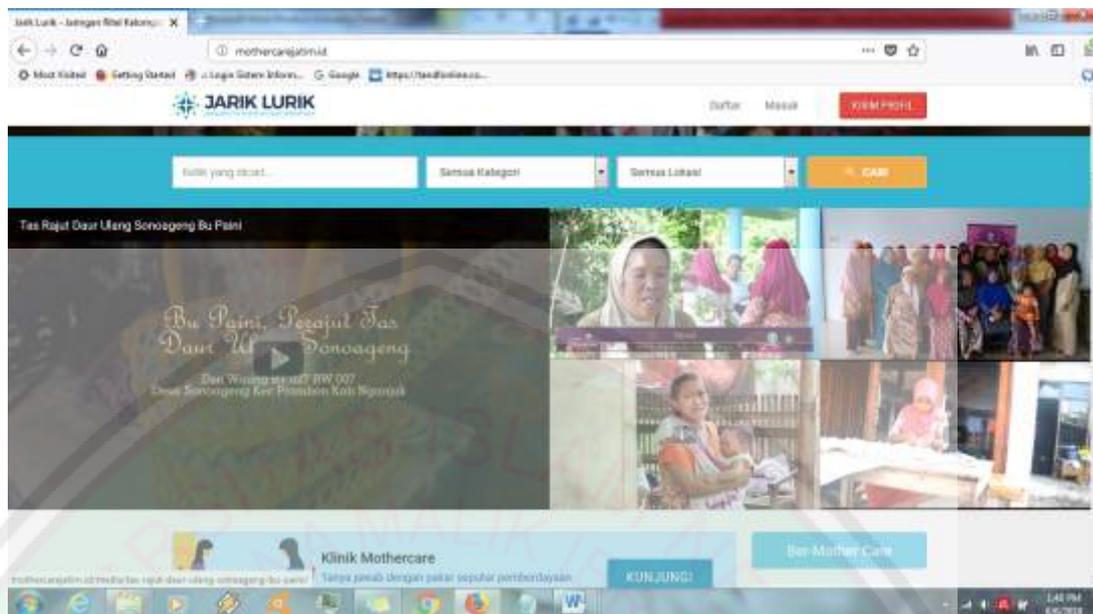
¹⁵⁷ Pendamping Desa Sumberagung, Ibu Tami, *Wawancara* (Blitar, 29 April 2018)

kurang mampu tapi punya potensi istilahnya anaknya kita bantu disekolahkan kemudian yang butuh bantuan kita sampaikan ke kabupaten, kemudian untuk pengembangan usaha kita wadai disana.¹⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pendamping ditingkat kabupaten telah menggagas pengadaan web khusus untuk keberlanjutan kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang diisi dengan konten-konten seputar KRTP seperti profil-profil usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan beserta hasil-hasil usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan yang layak untuk dipasarkan, usaha-usaha populer yang dijalankan oleh KRTP sasaran, fasilitas tanya jawab dengan dengan pakar seputar pemberdayaan KRTP, dan lain-lain. Harapan pengadaan web ini adalah membantu memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam pemasarannya, hal lain yang diangkat dari jejaring yang dibangun oleh pendamping tingkat kabupaten adalah tidak mengenyampingkan fungsi sosialnya, salah satu contohnya adalah membukakan akses-akses kepada lembaga sosial yang ada yang kemungkinan akses tersebut bisa membantu masyarakat dalam hal lainnya seperti pendidikan. Berikut gambar web yang digagas oleh pendamping tingkat kabupaten untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Pendamping Kabupaten, Bapak Anam, *Wawancara* (Blitar, 21 April 2018)

¹⁵⁹ <http://mothercarejatim.id/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018



Gambar 4.3

Web Jarik Lurik Mothercare Jatim

Sumber: <http://mothercarejatim.id/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018

Pernyataan tersebut selaras dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapang yang menunjukkan kesesuaian antara isi web yang diunggah dengan keadaan di lapang, yang artinya profil-profil KRTP yang diunggah di web tersebut benar-benar profil-profi KRTP yang usahanya masih beralan dan berpotensi untuk berkembang.

Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi pendamping, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu. Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat perbedaan peran masing-masing pendamping ditingkat kabupaten hingga desa, pendamping tingkat kabupaten bertugas mensosialisasikan dan

memfasilitasi program dari kecamatan hingga desa, pendamping tingkat kecamatan bertugas memfasilitasi kegiatan di tingkat kecamatan begitupula pendamping tingkat desa yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan yang berkaitan dengan program di tingkat desa. Peran pendampingan yang paling besar tanggungjawabnya dalam program ini ada di tingkat paling bawah yakni pendamping tingkat desa, karna pendamping desa didampingi semua pihak yang bertugas bertanggung jawab mengarahkan kepada rumah tangga sasaran penerima program agar menggunakan bantuan tersebut seefektif mungkin sehingga bisa tepat pemanfaatannya. Tepat pemanfaatan merupakan salah satu dari 3 indikator keberhasilan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dimana 2 yang lainnya adalah tepat sasaran dan tepat jumlah. Berikut hasil wawancara yang menyatakan bahwa program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini harus sesuai dengan 3 indikator keberhasilan tersebut:

Iya, yang memverifikasi agar tepat sasaran itu ndak hanya dari kabupaten saja maksudanya dari kita sebagai pendamping, dari dinas juga ada, dari dinas Provinsi juga ada, dari universitas Bawijaya juga ada, semua terjun, yang dari universitas Brawijaya itu LPPM. Program ini sudah ada juknisnya kok mbak, jadi mulai pra rembuk, pra rembuk itu nyusun sekretariat sama pendamping, itu juga lewat rembuknya, setelah itu selesai kita ada namanya daftar penerima itu, itu juga ndak kaya program sekarang, itu kita tanyakan ke desa kita survey nah itulah lewatnya rembuk warga itu, jadi di rembuk warga itu umpamanya yang namanya bu partinem ini sudah lebih bagus daripada tetanganya ya diganti dan itu langsung masyarakat.¹⁶⁰

Yang menentukan uang bantuan itu diperuntukkan untuk apa ya warga sendiri, dia ngomong ke kita mau usaha ini, jadi kita membantu mendampingi membelanjakan, dari pembuatan proposal benar-benar uang 2.500.000 itu memang dipakai buat usaha, jadi mereka tidak dilepas, contohnya jualan rujak belanja apa saja kita tahu, atau kita yang

¹⁶⁰ Pendamping Kabupaten, Bapak Anton, *Wawancara* (Blitar, 23 April 2018)

membelanjakan, kalau orangnya yang memebelanjakan kita minta notanya.¹⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa 3 indikator keberhasilan pelaksanaan program telah diupayakan semua *stakeholder* agar sesuai dengan indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut yakni tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan. Untuk mendukung indikator pertama yaitu tepat sasaran dilakukan verifikasi data dimana data yang turun dari Pemprov dan bersumber dari PPLS tahun 2011 apakah masih sesuai dengan keadaan penerima atau tidak, jika data tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi penerima maka lewat rembuk warga pendamping kabupaten beserta pendamping desa didampingi oleh perangkat desa setempat berkewajiban mengalihkan bantuan tersebut kepada yang lebih berhak menerimanya. Sebelum dilaksanakan verifikasi penerima bantuan terlebih dahulu dilakukan pra rembuk warga dan rembuk warga.

Meskipun pada kenyataannya terdapat KRTP yang jauh lebih membutuhkan namun ia tidak masuk dalam kriteria, maka KRTP tersebut tidak diperkenankan untuk menerima bantuan tersebut, hal ini selaras dengan hasil wawancara berikut:

Kita kalau mementingkan toleransi ya secara manusiawi kita punya belas kasihan jika ada tetangga yang lebih membutuhkan, ada tetangga saya yang namanya mbah tari yang hidupnya sebatang kara, rumahnya kecil seukuran satu kamar saya yang ini, terbuat dari bambu dan itu masih numpang, sehari-hari jualan dipasar, biasanya jualan botok dll, tapi dia malah tidak dapat karna sebatang kara. Ada lagi tetangga didekatnya yaitu yang saya bilang usianya lebih muda terus punya anggota keluarga, sedikitlah lebih mampu jika dibandingkan dengan mbah tari tapi dia malah dapat, ya itu kalau mementingkan toleransi kan kita lebih condong ke mbah tari, tapi karna ini program ada aturannya jadi kita tidak berani, ya harus kita lepas mbah tari tidak dapat.¹⁶²

¹⁶¹ Pendamping Desa Sidodadi, Ibu Yanti, *Wawancara* (Blitar, 23 April 2018)

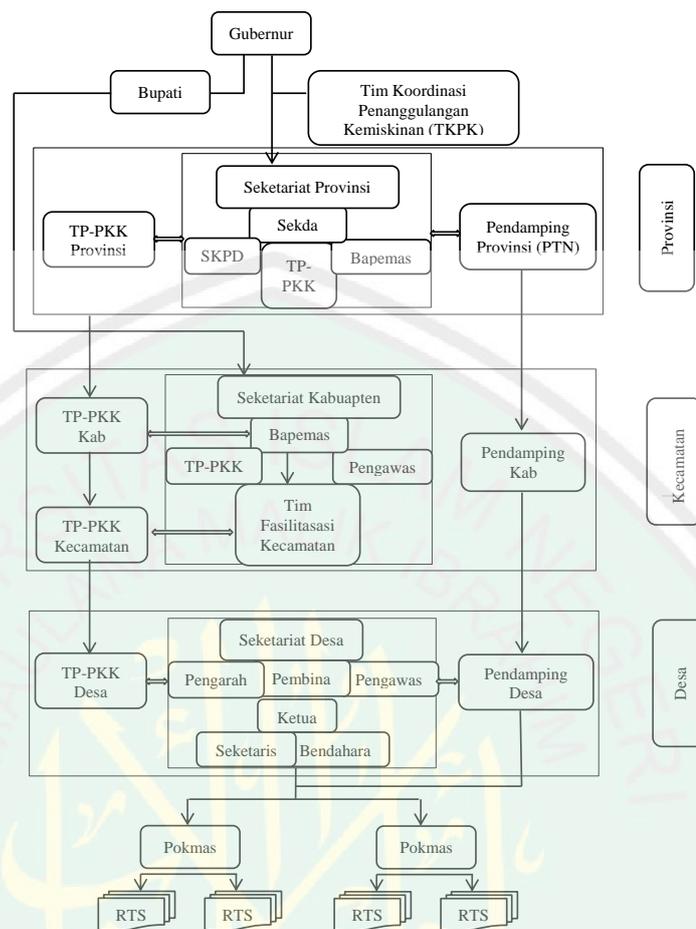
¹⁶² Pendamping Desa Selopuro, Ibu Siti Masitoh, *Wawancara* (Blitar, 28 April 2018)

Tepat jumlah dapat diartikan bahwa bantuan kepada rumah tangga sasaran berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 yang diterima dalam bentuk barang, dimana pembelanjaan barang-barang tersebut dilakukan oleh kepala rumah tangga perempuan itu sendiri diampingi oleh pendamping desa secara langsung, sebelum Kepala Rumah Tangga Perempuan menerima bantuan tersebut dibentuk kelompok masyarakat (pokmas) terlebih dahulu yang beranggotakan KRTP penerima program, setelah pokmas terbentuk kemudian dilakukan pendalaman kebutuhan KRTP, kemudian setelah dilakukan pendalaman kebutuhan yang didampingi langsung oleh pendamping desa diajukanlah pencairan dana hingga dana tersebut bisa direalisasikan.

Sedangkan tepat pemanfaatan dapat diartikan dengan realisasi pembelanjaan barang untuk usaha benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga sasaran. Sebelum merealisasikan pembelanjaan yang diinginkan oleh KRTP sekretariat kabupaten, desa, SKPD dan *stakeholder* yang terlibat didalamnya melaksanakan bimtek yang bertujuan agar KRTP dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan sehingga memberikan manfaat secara optimal secara ekonomi.

Berikut bagan organisasi struktural dan fungsional Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.¹⁶³

¹⁶³ Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal 39



Gambar 4.4

Gambar Bagan Organisasi Struktural dan Fungsional Jalin Matra
Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

(Sumber: Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016)

2. Dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal

akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Aktifitas pemberdayaan melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dari waktu ke waktu tentunya menentukan dampak yang akan dialami masyarakat khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan, karena hal tersebut merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemprov Jatim. Sehingga dari dampak yang terjadi akan menentukan meningkat atau tidaknya perekonomian rumah tangga sasaran yang dikepalai oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan.

Dari hasil wawancara salah satu penerima program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan beliau menjelaskan bahwa ada perubahan yang berarti setelah menerima program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, berikut pemaparannya.

Sebelum mendapatkan bantuan itu saya jualan sayur keliling dengan modal yang sedikit, setelah dapat bantuan program itu modal saya jadi tambah, dulu saya hanya jualan sayur dan sekarang saya julannya seperti toko jalan, sekali belanja dulu habis satu juta lebih, gerobaknya saja satu juta karna dari besi. Modalnya dulu buat beli gerobak dan buat belanja barang-barang sudah habis, beli ikan-ikan saja tidak lengkap. Yang terakhir dapat 250 itu buat beli sembako, untuk beras, minyak seperti itu, Alhamdulillah saya merasakan bedanya sebelum mendapatkan bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan program ini, saya jualan sayuran keliling itu untuk penghasilan utama, sebagai tulang punggung, putra saya yang dua itu sudah kerja sendiri untuk keperluan mereka sendiri, yang penting ndak ganggu ibunya. Alhamdulillah setelah dapat bantuan program saya bisa nabung sedikit-sedikit untuk kebutuhan sekolah anak-anak saya.¹⁶⁴

¹⁶⁴ KRTP Desa Sumberagung, Ibu Poniah, *Wawancara* (Blitar, 29 April 2018)

Hasil wawancara tersebut linier dengan data observasi yang ditemukan peneliti di lapang yang menunjukkan bahwa barang-barang yang dijual KRTP sasaran tersebut tergolong lengkap, bisa dikatakan seluruh kebutuhan pokok 4 sehat lima sempurna ada seperti beras, sayur, lauk pauk tersedia di gerobak yang digunakan untuk berjualan KRTP tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penambahan modal yang diterimakan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan berupa barang sangat membantu perputaran modal wirausaha yang telah dijalankan sehingga mampu berdampak kepada peningkatan perekonomian rumah tangga sasaran. Dari yang sebelumnya belum bisa menyisihkan penghasilannya untuk tabungan masa depan pendidikan putra-putrinya setelah mendapatkan bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk masa depan pendidikan putra-putrinya. Jika dikorelasikan dengan indikator perekonomian rumah tangga muslim yang salah satunya menyebutkan bahwa dalam transaksi-transaksinya seperti menabung, berinfak, kepemilikan, pemebrian zakat, investasi dan lain-lain dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya maka yang dilakukan Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut melalui bantuan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sudah sesuai dengan salah satu indikator perekonomian rumah tangga muslim itu sendiri.

Dampak lain yang bisa dirasakan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan dari program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini adalah Kepemilikan terhadap sumberdaya atau aset, berikut hasil wawancara yang menggambarkan

ada penambahan aset setelah Kepala Rumah Tangga Perempuan memperoleh bantuan program Penanggulangan feminisasi Kemiskinan.

Bantuannya saya dulu tidak saya minta dalam bentuk ternak mbak, tapi saya minta untuk dibelikan sepeda buat jualan sayuran, untuk uang tunainya saya gunakan untuk tambahan modal, terus saya juga buka toko setelah dzuhur, sebelum dapat bantuan program itu saya jualan sayur keliling menggunakan sepeda, karna sepeda saya rusak saya minta sepeda sisanya saya pakai buka toko depan ini, drumah saya bersama putri saya sekarang masih sekolah kelas 2 MTS. Bukti-bukti belanja ini saya simpan, kalau belanjanya orang-orang banyak kan kalau mau lebaran diberi hadiah, ya cuma sedikit belanja saya karna uangnya cuma segitu, dulu saya juga pengen kambing sebenarnya tapi ndak ada yang ngrawat, anak sayakan cewek, 15 tahun saya kerja sendiri, Alhamdulillah saya dapat bantuan ini terbantu, pokok anak saya berangkat sekolah saya berangkat jualan, saya berangkat jualan ketika si bungsu berangkat sekolah, nanti saya pulang jam 11, setelah dzuhur saya buka toko di depan ini. Sebelum dapat bantuan itu saya belum punya toko, setelah dpat bantuan itu saya buat toko kecil ini, dan alhamdulillah bisa nabung mbak setelah dapat bantuan ini, nabungnya untuk sekolah si bungsu.¹⁶⁵

Hasil wawancara tersebut didukung oleh data observasi yang dilakukan peneliti dilapang bahwa KRTP tersebut merupakan KRTP yang sangat jujur dalam kesehariannya, terbukti beliau masih menyimpan bukti-bukti pembelanjaan bantuan program yang direalisasikan dua tahun lalu hingga sekarang, melihat kesungguhan beliau itu maka sangat wajar jika usaha yang dijalankan beliau masih berjalan dan dari usaha tersebut beliau mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan pendidikan putrinya.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan bantuan dari program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ada penambahan aset berupa toko yang sebelumnya belum dimiliki Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut, penambahan aset berupa toko tersebut baik secara langsung

¹⁶⁵ KRTP Desa Sukosewu, Ibu Sri, *Wawancara* (Blitar, 8 Mei 2018)

maupun tidak langsung akan mendukung pertumbuhan perekonomian rumah tangga sasaran, dan apabila telah terjadi pertumbuhan perekonomian pada rumah tangga sasaran maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan pada rumah tangga sasaran tersebut, dimana hal itu telah dipaparkan dalam data observasi peneliti diatas.

Namun tidak semua Kepala Rumah Tangga Perempuan berhasil mengelola bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tersebut, ada sebagian Kepala Rumah Tangga Perempuan yang stagnan dalam melakukan usahanya, ada juga yang tidak berhasil atau gagal. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam mengelola bantuan dari program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tersebut, beberapa faktor tersebut telah dipaparkan salah satu responden dalam wawancara berikut:

Kegagalan itu ada beberapa faktor, faktor yang pertama adalah modal, kedua kemampuan seseorang, ketiga niat. Maksud saya kalau niatan ada modal tidak ada itu kan bisa kita selesaikan, tapi kalau modal tidak ada, niat tidak ada tidak bisa kita selesaikan, yang pentingkan tiga faktor itu.¹⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan Kepala Rumah Tangga Perempuan berhasil, stagnan dan bahkan gagal dalam mengelola usahanya, yang pertama adanya modal, kedua kemampuan berusaha itu sendiri dan yang terakhir adanya niat untuk berusaha. Faktor pertama dalam kasus ini sudah didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi Jawa

¹⁶⁶ Perwakilan Kades Sidodadi, Bapak Solikhin, *Wawancara* (Blitar, 24 April 2018)

Timur, sedangkan faktor kedua dan ketiga adalah faktor pembawaan dari masing-masing Kepala Rumah Tangga Perempuan itu sendiri.

Dari data observasi peneliti yang disimpulkan dilapang menunjukkan bahwa jika faktor pertama sudah sepenuhnya didukung oleh pemerintah maka faktor kegagalan yang menjadi sorotan yaitu faktor kemampuan atau faktor kedua, dimana penerima program PFK ini kebanyakan janda yang usianya diatas 55 tahun yang mana pada usia ini sudah bukan waktunya lagi untuk bekerja tapi menikmati masa tua, berdasarkan data observasi dilapang apabila penerima program PFK ini janda berusia dibawah 50 tahun usaha yang dijalankan cenderung masih berjalan, maka hal ini perlu diperhatikan untuk meminimalisir kegagalan yang ada.

Berikut beberapa hasil wawancara yang menggambarkan usaha yang dilakukan Kepala Rumah Tangga Perempuan berjalan stagnan bahkan cenderung gagal.

Sebelum mendapatkan bantuan itu saya sudah jualan es di TK, di TK saya lama, setelah dapat program itu karna faktor usia badan saya sudah tidak kuat untuk berjualan, jualan di sekolahan-sekolahan itu dulu ya jadi penghasilan utama, sambil putri saya kerja sampingan di sawah, kalau cuma mengandalkan sawah saja tidak mungkin cukup, sawahnya tidak besar, dan kalau cuma mengandalkan bantuan itu saja buat makan ber tiga juga tidak cukup, makanya disambi putri saya kerja disawah. Meskipun sekarang saya tidak jualan terus-terusan tapi alat-alat yang dibelikan dulu juga masih ada, kulkas, kompor, kalau pas ada modal lagi saya jualan lagi, biasanya kalau lebaran saya jualan mbak, waktu puasa saya jualan es, tergantung kondisi badan saya kuat apa tidak.¹⁶⁷

Dari bantuan yang diberikan dulu saya buat jualan gorengan, dan sekarang bantuan itu sudah habis, sekarang saya sudah tidak jualan karna saya sakit, habis buat makan dan beli obat selama empat bulan, selama saya sehat dulu ya saya jualan gorengan dan kripik- kripik itu saya titipkan di toko-

¹⁶⁷ KRTP Desa Sumberagung, Ibu Tumirah, *Wawancara* (Blitar, 29 April 2018)

toko, dulu bantuan saya berupa peralatan dan untuk modal belanja bahan, tapi ketika saya sakit itu barang-barang yang saya dapat itu saya jual untuk kepentingan berobat dan makan.¹⁶⁸

Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan dikatakan berjalan stagnan apabila dari bantuan yang diberikan sudah tidak berjalan namun modal yang diberikan berupa barang masih ada dan masih bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya, sedangkan dikatakan tidak berhasil atau gagal apabila bantuan dan modal yang diberikan dalam bentuk barang sudah tidak berjalan dan tidak tersisa sama sekali. Hal tersebut didukung oleh data observasi yang ditemukan peneliti di lapang yang menunjukkan bahwa KRTP yang tergolong stagnan adalah mereka yang masih menjalankan usahanya tapi hanya bersifat musiman.

C. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini disusun berdasarkan hasil paparan data yang ditemukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di Kabupaten Blitar. Berikut temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diangkat dalam tesis ini.

1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat serta tanggung jawab mereka dalam bermasyarakat maupun

¹⁶⁸ KRTP Desa Slorok, Ibu Kasifah, *Wawancara* (Blitar, 10 Mei 2018)

bernegara. Pemberdayaan masyarakat mutlak terjadi dimana saja terutama didaerah yang masyarakatnya mayoritas memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan atau masyarakatnya bisa dikategorikan dalam masyarakat pedalaman dan tertinggal. Dalam kehidupannya semua masyarakat tentunya bekerja untuk mencari pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, namun terkadang pekerjaan yang mereka jalani tidak serta merta mampu mengentaskan mereka dari ketidakberdayaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat sekitar.

Temuan penelitian terkait pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar yaitu terdapatnya indikator keberhasilan program yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut, indikator tersebut adalah tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

Tepat sasaran adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) PPLS 2011, RTS dilakukan verifikasi untuk mengetahui kondisi saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS yang dimaksud masih layak atau tidak untuk memperoleh bantuan, apabila RTS sudah tidak layak maka akan dilakukan pergantian RTS melalui mekanisme rembuk warga dengan tidak menambah alokasi RTS masing-masing desa.

Tepat jumlah adalah bantuan yang diberikan kepada RTS berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 yang diterimakan secara langsung dalam bentuk barang modal, pembelanjaan barang modal tersebut dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa.

Tepat pemanfaatan adalah realisasi pembelanjaan barang untuk usaha dilakukan oleh RTS sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan RTS mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana usaha RTS. Untuk memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut dilakukanlah tahap-tahap kegiatan yang dilakukan *stakeholder-stakeholder* pemerintah provinsi Jawa Timur diantaranya adalah diadakannya sosialisai di tingkat Provinsi hingga tingkat desa, di tingkat desa diadakan kegiatan pra rembug warga dan rembug warga untuk mensosialisasikan program dan memverifikasi penerima bantuan apakah masih layak menerima bantuan tersebut atau tidak, baru setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dibentuklah kelompok-kelompok masyarakat yang didampingi tenaga pendamping desa untuk melakukan pendalaman kebutuhan Kepala Rumah Tangga Sasaran yang kemudian akan di proses untuk diajukan ke pemerintah provinsi untuk direalisasikan untuk pemenuhan kebutuhan usaha yang diinginkan atau dikehendaki oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan.

Berikut hasil temuan penelitian terkait hal tersebut yang dikorelasikan dengan pelaksanaan program PFK di lapang:

Tabel 4.2. Hasil Temuan Penelitian Terkait Tahap Pelaksanaan Program (Sumber: Data diolah)

No	Tahapan Pelaksanaan Program	Temuan
1	Sosialisasi Provinsi hingga Desa	- Komunikasi yang kurang proaktif antara pendamping kabupaten dan kecamatan sehingga tidak menimbulkan sedikit ketimpangan informasi di salah satu pihak.
2	Ferifikasi data	- Peran serta Kepala Desa dengan perangkatnya dalam kegiatan survey awal. - Ditemukan tidak terjadi banyak pergeseran data

		kemiskinan dari BPS tahun 2011-2016 untuk KRTP.
3	Pembentukan POKMAS	- Pendamping desa kesulitan mencari pengurus Pokmas dikarenakan mayoritas anggota Pokmas identik berpendidikan rendah.
4	Pendalaman Kebutuhan Pokmas	- Pendalaman usaha disesuaikan dengan keahlian atau kemampuan KRTP, Kebutuhan dan Keinginan KRTP yang bersangkutan. - Diadakannya fasilitasi pelatihan jika banyak KRTP yang berminat. - Perbedaan harapan pemerintah atas pelaksanaan program dengan keadaan dilapang.
5	Pelaksanaan program	- Perbedaan pencairan dana dari desa ke KRTP sasaran antara desa satu dan desa lainnya. - Perbedaan pembagian peruntukan dana bantuan tergantung kebijakan masing-masing desa yang disesuaikan dengan kebutuhan KRTP masing-masing desa
6	Evaluasi pertanggungjawaban	- Jarak pelaksanaan monitoring perkembangan usaha yang kurang panjang.
7	Keberlanjutan	- Keberlanjutan pemantauan pendamping desa meskipun sudah dilakukan pemutusan hubungan secara resmi dari pusat. - Fasilitasi pemasaran produk.

Selain ditemukan indikator keberhasilan program yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut, ditemukan juga pembentukan jejaring yang digagas oleh pendamping kabupaten untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, jejaring yang dibentuk oleh pendamping kabupaten tersebut diberi nama motherchare jatim atau jarik lurik. Dalam jejaring itu pendamping kabupaten membantu mempromosikan dan memasarkan produk-produk Kepala Rumah Tangga Perempuan yang dirasa layak untuk dipasarkan. Lewat jejaring tersebut pendamping kabupaten juga membantu menghubungkan Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan Dinas-dinas Sosial untuk pemenuhan kebutuhan yang lainnya seperti pendidikan untuk putra-putrinya.

2. Dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi

Aktifitas yang dilahirkan dari Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan terhadap peningkatan ekonomi dari waktu ke waktu tentunya menentukan dampak yang akan dialami oleh masyarakat khususnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) program, sehingga dari dampak yang terjadi akan menentukan meningkat atau tidaknya perekonomian Rumah Tangga Sasaran tersebut. Salah satu dampak yang diharapkan dalam kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah terciptanya kemandirian RTS khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam perekonomiannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat yang bertujuan untuk melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan meningkatkan ketrampilan dan kepemilikan akses yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan anggota keluarganya.

Kemandirian menjadi salah satu dampak yang akan dirasakan oleh Rumah Tangga Sasaran atas kegiatan yang dilakukannya melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, mandiri merupakan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas dengan benar dan bermanfaat atas dorongan dan kemampuannya bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini terdapat kriteria keberhasilannya untuk pengelolaan bantuan yang diberikan kepada Kepala Rumah Tangga

Perempuan, kriteria tersebut adalah berjalan atau berkembang, stagnan dan gagal.

Dikatakan berjalan atau berkembang apabila setelah mendapatkan bantuan tersebut Kepala Rumah Tangga Perempuan mampu mempertahankan atau bahkan mengembangkan usaha yang ditekuninya dan usaha usaha tersebut mampu menopang kebutuhan sehari-hari Kepala Rumah Tangga Perempuan beserta keluarganya, sedangkan dikatakan stagnan apabila usaha yang dijalankan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan berjalan tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masih dibutuhkan usaha yang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dikatakan gagal apabila usaha yang dilakukan Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut sudah tidak berjalan sama sekali dan bahkan modal yang diberikan berupa barang modal lewat program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sudah habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut sampai tidak ada yang tersisa.

Jika dikorelasikan dengan pendapat Husain Syahatah tentang indikator perekonomian keluarga muslim dimana salah satu indikator menyebutkan bahwa dalam transaksi-transaksinya seperti berinfak, menyimpan atau menabung, kepemilikan, zakat dll dapat mewujudkan tujuan syarak bagi para anggotanya. Maka salah satu indikator tersebut bisa dilakukan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan apabila usaha yang dijalankannya masuk kedalam kategori berjalan atau berkembang dan stagnan, Kepala Rumah Tangga Perempuan yang masuk dalam kategori gagal hanya mempunyai kesempatan

yang amat kecil untuk bisa melakukan salah satu indikator perekonomian rumah tangga muslim yang disampaikan oleh Husain Syahatah tersebut. Berikut hasil temuan penelitian terkait dampak program PFK jika dilihat dengan indikator keberhasilan pengelolaan usaha yang dilaksanakan oleh KRTP dan dikorelasikan dengan indikator perekonomian muslim Husain Syahatah:

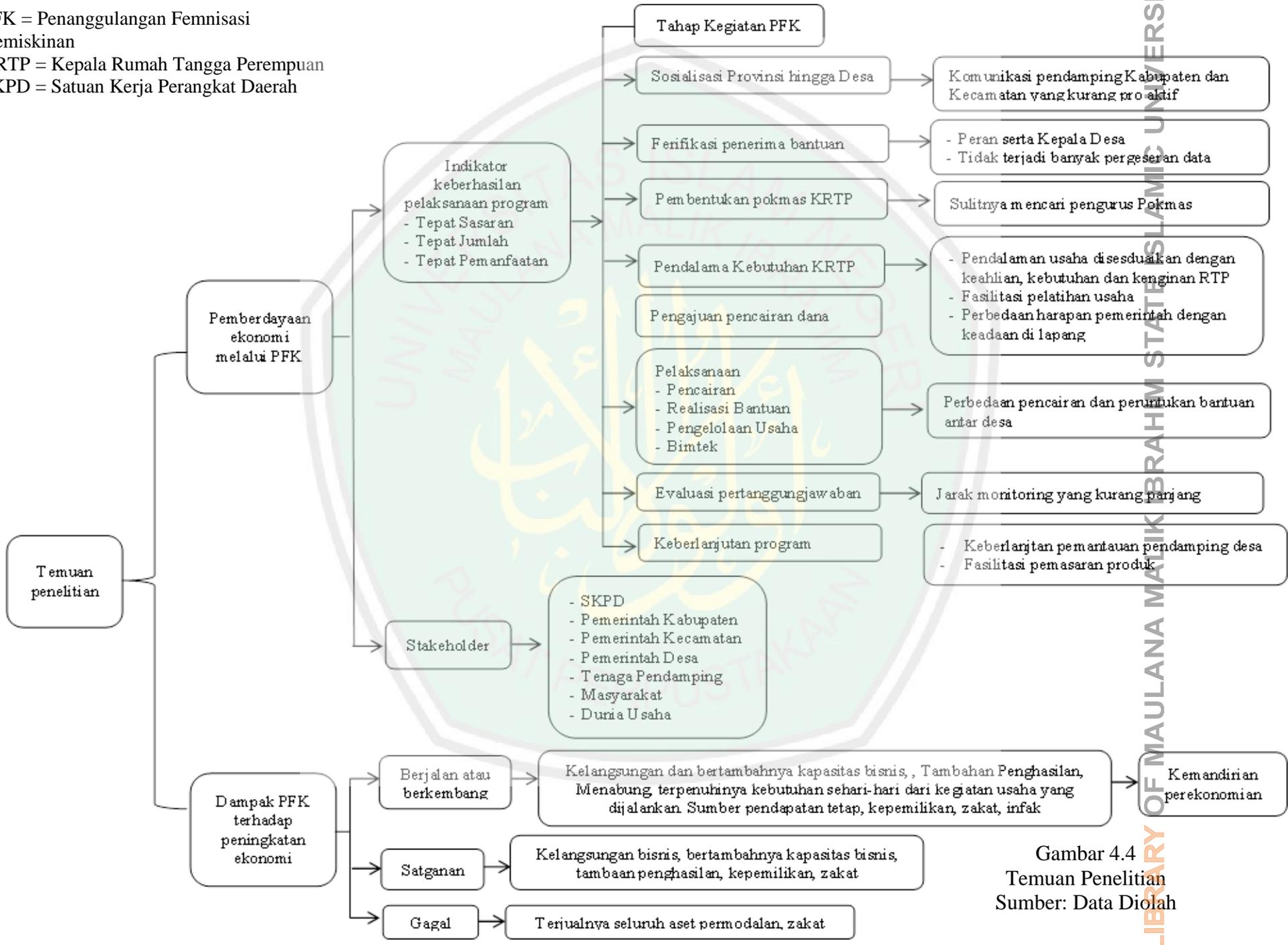
Tabel 4.3. Hasil Temuan Penelitian Terkait Dampak Program PFK
(Sumber: Data diolah)

No	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Usaha	Temuan
1	Berjalan atau berkembang	<ul style="list-style-type: none"> - Kelangsungan dan bertambahnya kapasitas bisnis - Tambahan Penghasilan - Menabung - Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dari kegiatan usaha yang dijalankan - Sumber pendapatan tetap - Kepemilikan - Zakat - Infak
2	Stagnan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelangsungan bisnis - Bertambahnya kapasitas bisnis - Tambaan penghasilan - Kepemilikan - Zakat
3	Gagal	<ul style="list-style-type: none"> - Terjualnya seluruh aset permodalan - Zakat

Berangkat dari fokus masalah yang menghasilkan temuan-temuan penelitian diatas dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Ket:

- PFK = Penanggulangan Femnisasi Kemiskinan
- KRTP = Kepala Rumah Tangga Perempuan
- SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah



Gambar 4.4
Temuan Penelitian
Sumber: Data Diolah

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Kabupaten Blitar

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya.¹⁶⁹

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari program Jalin Matra (Jalan lain menuju mandiri dan sejahtera) tahun anggaran 2015-2019 yang merupakan program lanjutan Jalin Kesra (Jalan lain menuju sejahtera) tahun anggaran 2009-2014 dimana kedua program tersebut digagas oleh pemerintah provinsi Jawa Timur yang berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kekurangan pendapatan saja namun juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah serta juga akibat meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rumah tangga

¹⁶⁹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

perempuan jika dibandingkan laki-laki dikarenakan meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin namun kemiskinan tersebut disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian semakin besar penghasilan perempuan maka semakin kecil kemungkinan anggota keluarga atau putra-putrinya menderita kekurangan gizi. Dengan kata lain apabila berhasil menanggulangi kemiskinan yang semakin berwajah perempuan maka dampak atau manfaat yang diperoleh akan berlipat (*multiplier effect*).

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) secara umum lebih kronis jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan pada sektor ekonomi namun juga probelematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkat kemiskinan tidak cukup jika hanya melalui fasilitas akses ekonomi tetapi juga memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari sosok atau figur yang secara keseharian sudah dikenal dan dinilai mampu memberikan perlindungan serta memiliki legitimasi sosial.

Figur tersebut yang selanjutnya menjadi "*Mother care*" atau sebagai sosok ibu atau orang tua yang menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat berjuang bersama-sama dalam upaya

keluar dari perangkat kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing KRTP. Berdasarkan kebutuhan tersebut kader dari tim penggerak PKK adalah figure yang tepat jika diposisikan sebagai “*Mother care*” bagi KRTP.

Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung karena telah terbentuk PKK di tingkat RW, RT dan kelompok desa wisma, sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga.

Dalam pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan terdapat 3 indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, indikator tersebut yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan. Tepat sasaran yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) PPLS 2011, RTS dilakukan verifikasi untuk mengetahui kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS yang dimaksudkan masih layak memperoleh bantuan program atau tidak, RTS yang tidak layak akan dilakukan penggantian melalui mekanisme rembuk warga dengan tidak menambah alokasi RTS masing-masing desa.

Indikator ke dua yaitu tepat jumlah, tepat jumlah diartikan dengan pemberian bantuan kepada RTS berupa uang tunai sebesar RP. 2.500.000 yang diterima secara langsung dan kemudian dilakukan pembelanjaan oleh KRTP dengan difasilitasi oleh pendamping desa. indikator ke tiga yaitu tepat pemanfaatan yang

dapat diartikan dengan realisasi pembelanjaan barang untuk usaha dilakukan oleh KRTP sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan KRTP mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana KRTP tersebut.

Untuk memenuhi ke tiga kriteria keberhasilan pelaksanaan program tersebut banyak tahap yang harus dijalankan oleh organisasi pelaksana program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dari sektor hulu hingga hilir, Jika tahap tersebut dikorelasikan dengan pendapat Isbandi Rukminto tentang tujuh tahapan pemberdayaan, maka tahap tersebut dapat dikelompokkan kedalam bagian-bagian seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Korelasi tahapan pemberdayaan Isbandi Rukminto dengan proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program PFK
(Sumber: Data Diolah)

No	Proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program	No	Tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto
1	sosialisasi provinsi	1	tahap persiapan
2	sosialisasi kabupaten		
3	pra rebug warga		
4	rebug warga		
5	ferifikasi penerima bantuan	2	tahap assesment atau identifikasi masalah
6	pembentukan pokmas KRTP	3	tahap perencanaan alternative
7	pendalaman kebutuhan KRTP		
8	pengajuan pencairan dana	4	tahap formulasi aksi
9	Pencairan	5	tahap pelaksanaan
10	realisasi bantuan		
11	Bimtek		
12	pengelolaan usaha		
13	Pertanggungjawaban	6	tahap evaluasi
14	keberlanjutan program	7	tahap terminasi atau pemutusan hubungan

Tahap persiapan yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas yaitu untuk menyamakan persepsi antar anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih, sedangkan penyiapan lapangan

dimaksudkan untuk melakukan kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.¹⁷⁰ Dalam proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program PFK penyamaan persepsi dilakukan dari sosialisasi provinsi hingga sosialisasi desa yang diwadahi dalam kegiatan rembug warga.

Sosialisasi provinsi dan kabupaten dilaksanakan dan difasilitasi langsung oleh DPMD provinsi selaku leading sektor dalam program ini, agenda kegiatan yang dijalankan dalam proses ini adalah penjelasan tentang PFK, sinkronisasi dan integrasi program atau kegiatan untuk mendukung PFK dan membahas rencana tindak lanjut pelaksanaan. Sedangkan sosialisasi Kecamatan dan desa dilaksanakan oleh pendamping kabupaten yang difasilitasi oleh DPMD kabupaten yang dilaksanakan melalui kegiatan pra rembug dan rembug warga, pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum rembug warga yang bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga dengan agenda pembentukan dan penetapan sekretariat desa dan penjaringan calon pendamping desa, kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dan difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan.

Sedangkan rembug warga yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh sekretariat desa dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh tim fasilitasi Kecamatan dan tenaga pendamping Kabupaten, kegiatan ini bertujuan menjelaskan kepada *stakeholder* tentang PFK, mensosialisasikan sekretariat desa dan pendamping desa dimana kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota sekretariat desa, BPD, Kasun lokasi RTS, perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping desa. Namun

¹⁷⁰ Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Baru, 2012), hal 35-37

dalam pelaksanaannya komunikasi yang dibangun dalam kegiatan pensosialisasian ini tidak selalu berjalan mulus, kurang proaktifnya komunikasi yang dilakukan pendamping kabupaten dan kecamatan ini memicu terjadi timpangnya informasi di salah satu pihak, hal ini juga memicu kerenggangan hubungan antar keduanya. Namun sejauh pelaksanaan kegiatan program ini dilapangan semua berjalan sesuai SOP yang berlaku.

Kegiatan pra rebug dan rebug warna ini juga dijadikan media pendekatan antar pendamping dan KRTP sasaran. Sedangkan wilayah yang menjadi sasaran program ini sudah ditentukan oleh pemprov Jatim setiap tahunnya, wilayah atau desa yang mendapatkan bantuan program ini bergilir dari wilayah satu ke wilayah yang lain agar terjadi pemerataan program.

Tahap Assesment merupakan tahapan pengidentifikasian masalah yang dirasakan sasaran program pemberdayaan sekaligus mengidentifikasi sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh sasaran. Dalam proses pemenuhan keberhasilan program tahap ini dilakukan pada proses ke lima yaitu ferifikasi penerima bantuan, dimana dalam kegiatan ferifikasi penerima bantuan terdapat kriteria kelayakan penerima bantuan dan apabila setelah diferikiasi ternyata KRTP sasaran sudah tidak sesuai dengan kriteria tersebut maka KRTP sasaran bisa diganti melalui rebug warga dengan pendampingan langsung oleh pendamping kabupaten. Dalam pelaksanaan ferifikasi ini sangat diperlukan peran serta antara Kepala Desa dan perangkatnya agar dalam proses pemferifikasian dan pergantian KRTP yang tidak sesuai dengan kriteria program bisa berjalan lancar, aman dan

transparan. Namun dalam pelaksanaannya dilapang, data yang di drop oleh Pemprov tersebut tidak mengalami banyak pergeseran.

Setelah pengidentifikasian masalah tahapan pemberdayaan selanjutnya yaitu dilakukan perencanaan alternatif program dimana pada tahap ini fasilitator atau pendamping kabupaten maupun pendamping desa secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapinya beserta pemecahannya. Kegiatan ini diwadai pada point enam dan tujuh yaitu pembentukan pokmas dan pendalaman kebutuhan KRTP sasaran program.

Pembentukan pokmas didasarkan atas kesamaan jenis usaha atau kedekatan rumah tinggal, dalam kelompok masyarakat dibentuk pula ketua dan bendahara kelompok serta rencana tindak lanjut kelompok tersebut. Pokmas yang dibentuk oleh KRTP tersebut dalam struturnya harus mempunyai ketua dan bendahara, penentuan siapa yang menjadi ketua dan bendahara tersebut di musyawarahkan bersama antar anggota pokmas didampingi pendamping desa, namun pada pelaksanaannya pendamping desa kesulitan mencari ketua dan bendahara pokmas tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan KRTP sasaran masih rendah.

Kegiatan pendalaman kebutuhan ini disesuaikan dengan keahlian, kebutuhan dan keinginan KRTP sasaran yang bersangkutan, namun jika KRTP sasaran tidak mempunyai keahlian apapun dalam dunia usaha dan KRTP tersebut menginginkan pelatihan ketrampilan untuk menunjang usaha yang akan dilaksanakannya maka dalam hal ini DPMD Kabupaten Blitar menyediakan fasilitasi pelatihan untuk hal tersebut. Tetapi sejauh ini belum ada KRTP sasaran yang tertarik untuk melaksanakan pelatihan ketrampilan tersebut untuk

menunjang kegiatan usaha yang akan dilaksanakannya, KRTP sasaran tersebut lebih memilih untuk menjalankan usaha ternak dibanding usaha ekonomi produktif atau perdagangan yang mana usaha ternak ini sebenarnya tidak terlalu dikehendaki oleh penyandang program, karena salah satu tujuan Pemprov Jatim mengucurkan bantuan ini adalah untuk menumbuhkan perekonomian kreatif masyarakat khususnya KRTP melalui dunia usaha.

Setelah tahap perencanaan alternatif dilakukan formulasi aksi terhadap apa yang KRTP gagas pada tahapan sebelumnya dalam bentuk tulisan atau pengajuan proposal sesuai dengan point ke delapan yaitu pengajuan pencairan dana. Pengajuan pencairan dana ini dilakukan melalui pokmas dimana KRTP harus menuliskan ide atau gagasannya dalam bentuk proposal, kegiatan ini sepenuhnya difasilitasi oleh pendamping desa dikarenakan tidak memungkinkannya apabila dilaksanakan oleh KRTP sasaran yang mana mayoritas pendidikan KRTP sasaran masih tergolong rendah.

Proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program point sembilan hingga dua belas masuk kedalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan dimana pada tahap ini dilaksanakan pencairan dana dari pemprov kepada KRTP sasaran melalui desa dan pokmas yang telah dibentuk. Dana dari pemprov tersebut sudah ditentukan peruntukannya untuk apa saja ketika dana tersebut diterima KRTP sasaran, yang mana minimal 70% dana yang diterimakan tersebut dialokasikan untuk modal usaha, maksimal 30% dialokasikan untuk usaha pendukung atau karangkitri (rumah pangan lestari) dan apabila KRTP sasaran membutuhkan sebagian dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar maka dana tersebut bisa dipergunakan

maksimal 10%. Ketentuan pencairan dana dari desa kepada KRTP sasaran proram seharusnya dilaksanakan dalam dua termin, namun dalam pelaksanaannya tidak semua pemerintah desa merealisasikan bantuan tersebut kepada KRTP sasaran dalam dua termin dan sesuai dengan pembagian-pembagian peruntukan yang telah ditentukan Pemprov dikarenakan perbedaan kebutuhan mayoritas KRTP desa satu berbeda dengan kebutuhan mayoritas KRTP desa lainnya, salah satu yang mempengaruhi hal tersebut yaitu perbedaan keadaan alam, kondisi perekonomian dan karakteristik masyarakat desa satu dan yang lainnya memang berbeda.

Tahap selanjutnya yaitu realisasi bantuan, realisasi bantuan ini dilakukan oleh KRTP melalui pembinaan dan pemantauan ketua pokmas, pendamping desa dan sekretariat desa. Dalam realisasi investasi usaha berupa sarana prasarana usaha yang dibutuhkan KRTP dalam rangka mengembangkan atau membuka usaha baru, keseluruhan kegiatan yang dilakukan KRTP dalam merealisasikan bantuan tersebut didampingi langsung oleh pendamping desa.

Setelah bantuan tersebut direalisasikan dan dijalankan, maka usaha yang dijalankan KRTP di evaluasi sampai sejauh mana keberhasilan pengelolaan bantuan tersebut yang kemudian dari hasil evaluasi tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dalam proses evaluasi pemerintah melaksanakan kegiatan monitoring terhadap perkembangan usaha yang dijalankan KRTP sasaran, monitoring tersebut dilaksanakan pada bulan ke dua atau ketiga pasca realisasi proram. Pelaksanaan monitoring tersebut dirasa kurang efektif jika monitoring yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan KRTP, pasalnya jika jarak pelaksanaan monitoring sangat

dekat dengan waktu realisasi program maka bantuan yang diterima kepada KRTP tentunya masih dalam keadaan berjalan kondusif, berbeda jika monitoring tersebut dilaksanakan satu atau dua tahun pasca realisasi program dilaksanakan.

Tahap terakhir dari kegiatan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto yaitu terminasi atau pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat sasaran yaitu KRTP, tahap ini seharusnya dilakukan ketika RTS sudah mampu mandiri dan bukan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya. Secara formal pada program Jalin Matra PFK terminasi atau pemutusan hubungan dilakukan ketika penyandang dana menghentikan bantuannya, namun secara non formal terminasi tidak benar-benar dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan ditingkat paling bawah yaitu desa. meskipun secara formal kegiatan PFK sudah selesai, namun pendamping desa tetap memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh KRTP sasaran program melalui kegiatan kemasyarakatan dan keseharian yang ada.

Proses pemenuhan keberhasilan program pada tahap terminasi yaitu adanya keberlanjutan program, meskipun program tersebut sudah dilakukan pemutusan hubungan secara formal, dalam hal ini pemerintah provinsi lewat pendamping kabupaten memfasilitasi dan memonitoring KRTP sasaran melalui web jarak lurik (jaringan retail kelompok usaha sedulur cilik) atau *mother care* Jaim yang telah disediakan. Melalui web ini pendamping kabupaten mempromosikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh KRTP sasaran, usaha yang dipromosikan pendamping kabupaten adalah usaha yang masuk dalam kategori berjalan atau berkembang. Selain dipergunakan untuk mempromosikan usaha yang dilaksanakan KRTP

sasaran, web ini juga berfungsi menghubungkan KRTP sasaran program dengan berbagai lembaga sosial, jadi selain faktor keberlanjutan program web ini mempunyai nilai sosial.

Untuk memperlancar pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan maka pemerintah membentuk organisasi pelaksana kegiatan yang mana organisasi tersebut menjadi *stakeholder* dalam kegiatan pengentasan kemiskinan ini, adapun organisasi pelaksana yang terlibat yaitu :

1. Organisasi pengelola Provinsi

Organisasi pengelola provinsi dikepalai langsung oleh gubernur Jawa Timur dimana salah satu tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan arahan kepada sekretariat program Jalin Matra Provinsi Jatim serta SKPD Pembina teknis dalam melaksanakan program tersebut. Di tingkat provinsi juga dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi, salah satu tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan, mengkoordinasikan dan memantau program, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program yang kesemuanya dipertanggungjawabkan hasilnya kepada gubernur.

Selain TKPK juga dibentuk sekretariat provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim dengan leading sektor Bapemas Provinsi, tugas sekretariat provinsi diantaranya yaitu menyelenggarakan pelatihan bagi

pengelola program, melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan program dan masih banyak lainnya yang hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan secara berkala kepada gubernur Jatim.

Stakeholder ditingkat provinsi yang lain yaitu Tim Penggerak PKK Jatim, dimana tugas dan tanggungjawabnya diantaranya yaitu: a.membantu melakukan sosialisasi kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa. b.melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK dll.

Stakeholder terkahir yang ada di tingkat provinsi yaitu pendamping provinsi, pendamping provinsi adalah tenaga pendukung dan mitra sekretariat provinsi dalam pengelolaan kegiatan PFK dari Perguruan Tinggi, tugas dan tanggungjawab pendamping provinsi diantaranya adalah: mendampingi sekretariat provinsi dalam mengelola program, bersama-sama sekretariat provinsi merekrut tenaga pendamping, memfasilitasi pendampingan pasca program oleh pemerintah desa dan TP-PKK dll. Perguruan tinggi yang menjadi mitra Pemprov dalam melaksanakan program ini adalah Universitas Brawijaya Malang, dimana dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang.

2. Organisasi pengelola Kabupaten

Pada tingkat kabupaten organisasi pengelola langsung oleh Bupati dimana salah satu tugas dan tanggungjawabnya yaitu membentuk dan menetapkan sekretariat Jalin Matra Kabupaten, menetapkan alokasi dana pendukung kegiatan, memberikan pembinaan dan arahan kepada sekretariat program Jalin

Matra kabupaten dalam pelaksanaannya dimana sekretariat kabupaten tersebut dikepalai oleh kepala dinas kantor Pemberdayaann Masyarakat Kabupaten beranggotakan staff SKPD terkait yang salah satu tugas dan fungsinya meliputi: menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedum dan PTO, melaksanakan ferivikasi dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus program Jalin Matra dan menyampaikan kepada sekretariat provinsi dll.

Adapun *stakeholder* selanjutnya yaitu TP-PKK Kabupaten dan Tenaga pendamping Kabupaten, dimana salah satu tugas dan tanggungjawab TP-PKK Kabupaten adalah mendukung Jalin Matra PFK melalui program dan kegiatan TP-PKK Kabupaten yang relevan, melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK dll. Sedangkan tenaga pendamping kabupaten sendiri merupakan tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi pendamping guna memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di tingkat kabupaten dimana salah satu tugas dan tanggungjawabnya yaitu: membantu sekretariat kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di kabupaten, memfasilitasi sekretariat desa dalam melaksanakan program dll.

3. Organisasi pengelola Kecamatan

Organisasi pengelola di kecamatan terdiri dari tim fasilitasi kecamatan yang beranggotakan camat, kasi pemberdayaan masyarakat dan ketua TP-PKK kecamatan dimana salah satu tugas dari tim fasilitasi kecamatan adalah membantu sekretariat kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jalin Matra. Namun dalam pelaksanaannya, tugas-tugas dari tim fasilitasi kecamatan banyak dilaksanakan oleh kasi pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa

Organisasi yang terlibat dalam pemerintah desa yaitu sekretariat desa, TP-PKK desa dan pendamping Desa. Sekretariat desa adalah penanggungjawab di tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, Ketua PKK sebagai Pembina, Ketua BPD sebagai Pengawas, Ketua LPMD sebagai Ketua, sekretaris desa sebagai sekretaris dan bendahara desa sebagai bendahara. Salah satu tugas dan tanggungjawab sekretariat desa yaitu melaksanakan verifikasi RTS, memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi lewat rembug warga, melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemandaatan bantuan di KRTP dll. Sedangkan tugas dan tanggungjawab TP-PKK Desa sama dengan tugas dan tanggungjawab TP-PKK ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Organisasi terakhir yang terlibat dalam pemerintah desa yaitu tenaga pendamping desa, pendamping desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi pelaksanaan PFK di desa, pendamping desa ini merupakan kader dalam PKK yang mendampingi pokmas dan KRTP dalam pelaksanaan Jalin Matra PFK, tugas dan kewajiban pendamping desa yaitu memfasilitasi segala kegiatan KRTP dalam pelaksanaan program Jalin Matra PFK sesuai dengan Pedum dan PTO yang berlaku.

5. Kelompok Masyarakat (pokmas)

Kelompok masyarakat adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial yang anggotanya maksimal terdiri dari 20 KRTP dan atau memperhatikan kedekatan tempat tinggal, susunan pengurus pokmas terdiri dari ketua dan bendahara yang berasal dari KRTP sasaran. Pokmas ini berfungsi sebagai lembaga penghubung dalam rangka mengefektifkan pencairan bantuan, realisasi usaha KRTP dan bimbingan usaha serta pengembangan jaringan.

Salah satu tugas dan tanggungjawab pengurus pokmas yaitu membuka rekening atas nama kelompok KRTP, menyalurkan pencairan dana bantuan ke anggota pokmas secara bertahap, mengkoordinasikan dan memantau perkembangan realisasi bantuan anggota, mengkoordinasikan realisasi kegiatan usaha bersama kelompok dan melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

B. Dampak Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi,

sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Aktifitas yang dilahirkan dari Penanggulangan Feminsiasi Kemiskinan tentunya mempunyai asas kemanfaatan yang berbeda terhadap masing-masing usaha yang dijalankan oleh RTS sasaran, dari kemanfaatan tersebut bisa dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi atau pendapatan RTS, apabila terjadi peningkatan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan maka akan tumbuh budaya usaha mandiri pada RTS khususnya KRTP, namun apabila tidak terjadi peningkatan ekonomi atau pendapatan yang stabil maka budaya usaha mandiri tersebut tidak akan tumbuh.

Dalam pelaksanaan program Penanggulangan Feminsiasi Kemiskinan terdapat tiga kriteria keberhasilan untuk pengelolaan bantuan yang diberikan kepada KRTP sasaran, kriteria tersebut yaitu berjalan atau berkembang, stagnan dan gagal. Ketiga kriteria tersebut menggambarkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari program PFK terhadap perekonomian KRTP sasaran.

Dikatakan berjalan atau berkembang apabila setelah mendapatkan bantuan tersebut KRTP mampu mempertahankan atau bahkan mengembangkan usaha yang ditekuninya. Kemampuan mengembangkan usaha tersebut menggambarkan adanya kelangsungan dan bertambahnya kapasitas bisnis yang diusahakan, penambahan kapasitas bisnis dapat berupa bertambahnya modal yang diusahakan dan bertambahnya aset kepemilikan. Usaha tersebut juga mampu menopang kebutuhan sehari-hari KRTP beserta keluarganya. Selain itu, dari kegiatan yang diusahakan KRTP mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan

masadepan, zakat infak dan shodaqoh yang sekarang telah bergeser menjadi kebutuhan bagi setiap muslim.

Dikatakan stagnan apabila usaha yang dijalankan oleh KRTP tetap berjalan namun usaha tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masih dibutuhkan usaha lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain usaha yang dijalankan KRTP tersebut dijalankan hanya untuk mencari tambahan penghasilan, keberlangsungan usaha yang dijalankan KRTP kategori ini bisa dikatakan masih berlangsung atau berjalan, namun keberlangsungannya hanya 50%. Jika dilihat keadaan perekonomiannya, KRTP yang masuk dalam kategori ini masih bisa melaksanakan rukun islam yang ke tiga yaitu menunaikan zakat, dalam usahanya KRTP juga mengalami penambahan kapasitas bisnis berupa penambahan aset kepemilikan barang modal.

Sedangkan dikatakan gagal apabila usaha yang dijalankan KRTP sudah tidak berjalan sama sekali dan bahkan modal yang diberikan berupa barang modal lewat program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sudah habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari KRTP sampai tidak ada yang tersisa, namun dalam perekonomiannya KRTP masih sanggup memenuhi rukun islam yang ke tiga yaitu zakat.

Apabila dalam pengelolaan usahanya KRTP masuk kedalam kategori berjalan atau berkembang maka KRTP tersebut secara langsung maupun tidak langsung sudah mengalami peningkatan pendapatan atau ekonomi, tidak mungkin usaha yang dijalankan KRTP tetap berjalan atau bahkan bisa berkembang apabila usaha tersebut tidak memberi sumbangsi terhadap peningkatan pendapatan atau

perekonomian terhadap KRTP. Jadi KRTP yang masuk kedalam kriteria berjalan atau berkembang dalam pengelolaan usaha melalui PFK mampu menumbuhkan budaya usaha mandiri tetapi tidak demikian terhadap KRTP yang masuk kriteria stagnan dan gagal.

Jika ditinjau dari salah satu indikator perekonomian keluarga muslim yang disampaikan oleh Husyain Syahatah menyebutkan bahwa sistem perekonomian rumah tangga muslim didalam transaksi-transaksinya seperti berinfak, menyimpan atau menabung, kepemilikan, pemberian zakat dan lain-lain dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh KRTP yang tergolong berjalan atau berkembang dan stagnan dalam pengelolaan usahanya, KRTP yang masuk dalam kategori gagal hanya mempunyai kesempatan yang amat kecil untuk bisa melakukan salah satu indikator perekonomian rumah tangga muslim yang disampaikan oleh Husain Syahatah tersebut. Berikut pemaparan tentang salah satu indikator perekonomian keluarga muslim yang disebutkan Husain Syahatah diatas.

a. Infak dan sedekah

Didalam Islam, sedekah dan infak merupakan salah satu sistem jaminan sosial dimana kebutuhan manusia atas infak dan sedekah telah bergeser kepada kebutuhan. Menurut Islam sedekah dibagi menjadi dua bagian yaitu sedekah wajib atau zakat harta dan sedekah sukarela atau sedekah yang pengeluarannya disamarkan atau disembunyikan. Sedekah yang disamarkan atau disembunyikan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sedekah yang dipamerkan atau ditunjukkan karena menampakkan sedekah dapat menimbulkan riya' dan iri dan

juga dapat pula menyakiti hati orang yang diberi. Gambaran sedekah sukarela telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ

عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^{٢٧١}

Artinya:

Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Simpanan dan tabungan

Islam menganjurkan kepada para anggota keluarga muslim untuk menyimpan dan menabung jika memiliki kelebihan setelah kebutuhan pokok terpenuhi untuk menghadapi keadaan yang sulit dan fakir di masa mendatang (bersifat jaga-jaga), Allah berfirman¹⁷¹:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ^ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ^{٢٧٢}

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun

¹⁷¹ QS. Luqman: 34

yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Selain simpanan dan tabungan bermanfaat untuk masa mendatang, generasi selanjutnya dalam keluarga muslim memiliki hak atas harta yang dimiliki kedua orang tuanya. Oleh karena itu seluruh anggota keluarga harus dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan syariat Islam, salah satu contoh pengembangan usaha yang sesuai dengan syariat yaitu menjauhi riba dalam keseluruhan transaksi yang berkaitan dengan usaha ataupun kehidupan sehari-hari.

3. Kepemilikan

Didalam Islam kepemilikan dianggap sebagai suatu hal yang penting sebab mampu mendorong semangat bekerja, kepemilikan merupakan dasar asasi dalam keseluruhan transaksi. Dalam teori aturan kepemilikan, Husain Syahatah menyebutkan terdapat empat aturan yang telah ditetapkan Islam dalam kepemilikan harta dalam keluarga muslim yaitu kepemilikan harta yang bersifat sementara, pemisahan harta suami dari harta istri, harta anak merupakan milik dari orangtuanya dan warisan adalah salah satu sumber dari kepemilikan.¹⁷² Penjelasan terkait aturan kepemilikan harta hanya bersifat sementara telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّا لَحُنُّ نَرْتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿١٠٠﴾

¹⁷² Husein Syahatah. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* terjemahan dari buku asli *Iqtishadil Baitil Muslim fi Dau'isy Syari'atil-Islamiyyah*, (Jakarta:Gema Insani), 1998. hal. 88

Artinya: Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.¹⁷³

4. Pemberian zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim sebab zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang fakir, tetapi merupakan hak orang fakir dengan ukuran tertentu. Perintah kewajiban menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah melaksanakan sholat seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹⁷⁴

Selain zakat merupakan sebuah kewajiban yang dilaksanakan setiap muslim zakat merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah. Zakat mampu menyucikan jiwa dari syirik dan dosa-dosa kecil terhadap Allah, zakat juga merupakan mediasi pembersihan hati kepada kecintaan terhadap harta secara berlebihan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

¹⁷³ Qs. Maryam: 40

¹⁷⁴ Qs Al-Baqoroh: 110

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁷⁵

5. Keberlangsungan usaha atau bisnis yang dijalankan

Kajian keberlangsungan usaha ada beberapa jenis diantara yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumberdaya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu, memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumberdaya dan melindungi sumberdaya.¹⁷⁶

Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan untuk perkembangan aktivitas usaha dalam kerangka Islam demi tercapainya keberlangsungan usaha, diantaranya yaitu produksi, pemasaran, permodalan dan MSDM.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Qs At-Taubah: 103

¹⁷⁶ Muhammad Abdul Ghani. 2005. *The Spirituality Business: Pencerahan Hati Bagi Pelaku Usaha*. (Jakarta: Pena, 2005) Hal.140

¹⁷⁷ Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 209

6. Bertambahnya kapasitas usaha atau bisnis yang dijalankan

Ketika Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Islam juga menganjurkan agar hasil usahanya dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Keluarga muslim dalam mengelola pembelanjaan, harus berprinsip pada pola konsumsi islami yaitu berorientasi kepada kebutuhan disamping manfaat, sehingga hanya akan belanja apa yang dibutuhkan dan hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat (QS. Al-Baqarah:172, Al-Maidah:4, Al-A'raf:32).

7. Sumber pendapatan tetap dan tambahan penghasilan

Islam memeposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban, oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha akan dinilai ibadah dan berpahala. Dengan berusaha kepala keluarga tidak hanya bisa menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki untuk makhluknya yang ada di bumi, namun untuk mendapatkannya diharuskan untuk bekerja dan berusaha, manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melakukan sebuah usaha yang mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial, ekonomi yang bersifat pribadi ialah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah ekonomi yang diupayakan dalam mengurangi nilai kemiskinan dan kelaparan.

Dalam mencari pendapatan, Islam tidak memperkenankan seseorang untuk ngoyo dalam pengertian berusaha diluar kemampuannya dan terlalu terobsesi

sehingga mengorbankan atau menelantarkan hak-hak yang lain baik kepada Allah, diri maupun keluarga seperti pendidikan dan perhatian kepada anak dan keluarga. Rasul bersabda: “Sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu dan tubuhmu ada hak atasmu yang harus engkau penuhi, maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Allah telah menegaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.(QS.Al-Baqarah:286). Namun bila kebutuhan sangat banyak atau pasak lebih besar daripada tiang maka dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling membantu antara suami istri dalam memperbesar pendapatan keluarga dan melakukan efisiensi dan penghematan sehingga tiang penyangga lebih besar dari pada pasak. Rasulullah bersabda: “Janganlah kamu bebani mereka dengan apa-apa yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan apabila kamu harus membebani mereka diluar kemampuan, maka bantulah mereka.” (HR. Ibnu Majah).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk peningkatan perekonomian keluarga muslim di Kabupaten Blitar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan adalah upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi angka kemiskinan dan pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang masih dalam usia produktif. Dalam prosesnya keterlibatan semua pihak pelaksana dari jajaran provinsi hingga desa sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini, selain itu untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah provinsi melalui pendamping desa menyediakan web khusus yang dapat membantu KRTP sasaran mempromosikan usaha yang dijalankannya dan juga membantu KRTP terhubung dengan lembaga-lembaga sosial yang ada.
2. Pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan melalui program penanggulangan feminisasi kemiskinan secara umum memberikan nilai yang positif bagi keseluruhan kehidupan KRTP sasaran, nilai-nilai yang ditimbulkan dari program tersebut jika dikorelasikan dengan indikator perekonomian rumah tangga Husain Syahatah yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian rumah tangga muslim didalam transaksi-transaksinya seperti berinfak, menyimpan atau menabung, kepemilikan, pemberian zakat dll ternyata nilai yang

ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut tidak sebatas pada itu, namun ada penambahan nilai yang menyebutkan bahwa perekonomian rumah tangga muslim dalam pelaksanaan usahanya terdapat keberlangsungan dan pertambahan kapasitas didalam usaha yang dilaksanakannya, selain itu dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan keseharian dan menjadi sumber pendapatan atau hanya sebatas pada tambahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk peningkatan perekonomian keluarga muslim di Kabupaten Blitar, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat khususnya KRTP sasaran

Masyarakat atau khususnya KRTP harus memanfaatkan dan mengoptimalkan program PFK yang bertujuan meningkatkan perekonomian rumah tangganya dan juga masyarakat sekitarnya. Diharapkan setelah program selesai, dengan modal yang telah diterima tersebut KRTP mampu menjalankan, mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

2. Bagi Pemerintah

Seharusnya pemerintah melakukan pendalaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan, kemampuan dan kemauan KRTP sasaran dalam melaksanakan usaha yang akan dijalankan sehingga ketika program selesai bantuan yang diterima kepada KRTP tidak akan hilang atau dijual. Waktu pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan pemerintah dirasa sangat dekat jaraknya jika

dilaksanakan dua atau tiga bulan pasca realisasi program, seharusnya monitoring tersebut dilakukan pemerintah minimal satu tahun pasca realisasi program, sehingga rasa tanggungjawab KRTP untuk tetap mengelola usaha yang dijalankannya masih terpupuk dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abad Badruzaman. 2007. *Teologi kaum tertindas*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Agung Utama, Titin Hera widi Handayani. 2014. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol 19 No 2, Oktober.

Amin Kuncoro & Kadar. 2016. *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*. Jurnal Buana Gender, Vol 1 Nomor 1, Januari-Juni.

Ancok, Jamaludin. 1995. *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta.

Aries, Ernen Fabru. <https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aziz Muslim. 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudera Baru.

Aziz, M. Amin. 2006. *Model Pemberdayaan Fakir Miskin*. Surat Kabar Republika, 6 Desember 2006.

Bastaman, Hanna Djumhana. 1995. *Integrasi Psikologi dengan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basuki, A. & Prasetyo, Y.E. 2007. *Memusiumkan Kemiskinan*. Surakarta: PATTIRO Surakarta.

Bintoro, Tjokromidjojo. 1987. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Bungin, Burhan, 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.

- Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi. 2005. *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*. Worl Economic Forum. Diakses dari situs: www.weforum.org.
- Creswell, J.W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Darwin, M. 2005. *Memanusiakkan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Benang Merah.
- Departemen, P. & K. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Ratnasari. 2016. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren*. Jurnal 'Ainil Islam. Vol 9 No 1, Juni.
- Dzuhayatin. 1996. *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan Dalam Islam*, Dalam Buku *Sangkar Peran Gender*, Irwan Abdullah. Yogyakarta: PPK-UGM.
- Engineer, Ashgar Ali. 2000. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cicik Farha, Yogyakarta: LSPPA.
- Farida Hydro Foilyani. 2009. *Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Pembangunan*. Jurnal WACANA, Vol 12 No 3, Juli.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternatif Development*. Oxford, USA: Blackwell.
- Ghani, Muhammad Abdul. 2005. *The Spirituality in Business: Pencerahan Hati Bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Pena.
- Ginjar Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Ginjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Ginjar Kartasasmita. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Gutierrez, L. 1990. *Working with Woman of Color*. Social Work.

- Hasanatu Jannah. 2011. *Pemberdayaan Perempuan dalam Spiritualisme Islam*. Jurnal KARSA, Vol 19 No 2.
- Hastuti & Diyah Respati. 2009. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Jogjakarta.
- Jhingan, M.L, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda).
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kabeer, Naila. 2001. *Reflections on The Measurement of Women's Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices*. Sida Studies No3 Journal.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2002. *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Kuswanto, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh penelitian*. Bandung: Widya Padjajaran.
- M. Sastraprateja, dalam Tonny D.Widiastono (Editor). 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- M. Umer Chapra, 2000. *Sistem Moneter Islam*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardi Yatmo Hutomo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Press.
- Marwanti, S. & Astuti, D. 2012. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar*. Jurnal SEPA, Vol 9 NO 1, September.
- Maryono. 2010. *Menakar Kebijakan RSBI*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Mas'ood Mochtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

- Mayoux, Linda. 2001. *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*. Aga Khan Foundation. Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moghadam, Valentine. 2005. *Globalizing Women: Transnational Feminist Networks*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moser, C.O.N. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training (terjemahan Hartian Silawati)*. London/ New York: Routledge.
- Mubiyarto. 1996. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Adiyana Press.
- Mubyarto. 1996. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta :Aditya Media.
- Murniati Ruslan. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender*. Jurnal MUSAWA, Vol 2 No 1.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth Edition*. Boston: Pearson Education.
- Noval, Dean. 2001. *Inkubator Bisnis sebagai Salah Satu Sarana Pewujud Misi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Makalah pada Seminar Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Pancasila.
- Nurdiana Nina. 2014, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*. Jurnal ComTech Vol.5 No.2.
- PPS UIN Malang. 2015. *Pedoman Penelitian Tesis, Disertasi, dan Makalah*. Malang: PPS UIN Malang.
- Prastowo Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada).

- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa).
- Retno Endah Supeni. 2011. *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*. Jurnal Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Jember.
- Rohman Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Roni Ekha Putra. 2007, *Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Demokrasi. Vol. 6. No.1.
- Rosalia Indriyati Septiyaningsih. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*. Jurnal seminar nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rusdian, Pohan. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta:Ar-Rijal Institute dan Lanarka Publisher.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York. Anchor Books.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Kesetaraan Gender dalam Islam*, kata pengantar *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, oleh Nasarudin Umar. Jakarta: Paramadina.
- Shiva, V & M, Mies. 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Terj. *Dari Ecofeminism oleh Kelik Ismunanto & Lilik*. Yogyakarta: IRE Press.
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi sesuatu pengantar*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat.
- Sri Marwanti & Ismi Dwi Astuti. 2012. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karangnyar*. Jurnal SEPA, Vol 9 No 1, September.
- Sugiono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif. Cet III*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Stabilisasi Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: BAPPENAS.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahatah Husain, 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Penerjemah Dudung R.H. dan Idhoh Anas, Jakarta : Gema Insani Press.
- Toffler, Alfin. 1992. *Gelombang Ketiga*. Jakarta: Pantja Simpati.
- Valentine,C.A. 1968. *Culture and Poverty*. The University of Chicago Press. Chicago & London.
- Veithzal, Rivai, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Westra, Pariata, dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Widaningroem, Retno, Saksono, Haery dan Kanoni, Sri, 1999. *Strategi Wanita Dalam Mata Rantai Perdagangan Hasil Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal Gender Volume I No. 1, Juli.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yin,Robert K. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1**Data Nara Sumber Penelitian**

No	Nama	Peran	Kecamatan	Desa
1	Bapak Drs. Mujianto	Kadin PMD Blitar		
2	Bapak Anam	Pendamping Kabupaten		
3	Bapak Anton	Pendamping Kabupaten		
4	Bapak Zen	Pendamping Kabupaten		
5	Ibu Kasiva	Kasi PMD Kecamatan	Garum	
6	Ibu Istiqomah	Kasi PMD Kecamatan	Gandusari	
7	Ibu Anik	Kasi PMD Kecamatan	Selopuro	
8	Ibu Sri Haryanti	Kasi PMD Kecamatan	Kanigoro	
9	Bapak Solikin	Kepala Desa	Garum	Sidodadi
10	Bapak Mustofa	Kepala Desa	Garum	Slorok
11	Bapak Sumiadi	Kepala Desa	Gandusari	Sumberagung
12	Bapak Mardi Basuki	Kepala Desa	Gandusari	Sukosewu
13	Bapak Muh Nur	Kepala Desa	Kanigoro	Karangsono
14	Bapak Sifaunida	Kepala Desa	Selopuro	Selopuro
15	Ibu Yanti	Pendamping Desa	Garum	Sidodadi
16	Ibu Fitri	Pendamping Desa	Garum	Slorok
17	Ibu Tami	Pendamping Desa	Gandusari	Sumberagung
18	Ibu Siti Masitoh	Pendamping Desa	Gandusari	Sukosewu
19	Ibu Kunik	Pendamping Desa	Kanigoro	Karangsono
20	Ibu Rina	Pendamping Desa	Selopuro	Selopuro
21	Ibu Marfiah	KRTP Sasaran	Garum	Sidodadi
22	Ibu Sugiaturun	KRTP Sasaran	Garum	Sidodadi
23	Ibu Lasikem	KRTP Sasaran	Garum	Sidodadi
24	Ibu Paini	KRTP Sasaran	Garum	Slorok
25	Ibu Winarsih	KRTP Sasaran	Garum	Slotok
26	Ibu Kasipah	KRTP Sasaran	Garum	Slorok
27	Ibu Tukiyah	KRTP Sasaran	Gandusari	Sumberagung
28	Ibu Poniayah	KRTP Sasaran	Gandusari	Sumberagung
29	Ibu Tunirah	KRTP Sasaran	Gandusari	Sumberagung
30	Ibu Sri	KRTP Sasaran	Gandusari	Sukosewu
31	Ibu Temi	KRTP Sasaran	Gandusari	Sukosewu
32	Ibu Warsiah	KRTP Sasaran	Gandusari	Sukosewu
33	Ibu Muntoyah	KRTP Sasaran	Kanigoro	Karangsono
34	Ibu Rumini	KRTP Sasaran	Kanigoro	Karangsono
35	Ibu Muntiah	KRTP Sasaran	Kanigoro	Karangsono
36	Ibu Kasianti	KRTP Sasaran	Selopuro	Selopuro
37	Ibu Suntanti	KRTP Sasaran	Selopuro	Selopuro
38	Ibu Sunarsih	KRTP Sasaran	Selopuro	Selopuro

Lampiran 2

Dokumentasi kegiatan penelitian



Wawancara dengan Kadin PMD Kabupaten Blitar



Wawancara dengan Kasi PMD Kecamatan Garum



Wawancara dengan Pendamping Kabupaten



Wawancara dengan Pendamping Kabupaten



Wawancara dengan Kades Slorok



Usaha yang dijalankan salah satu KRTP Sasaran Programdi Desa Selopuro



Wawancara dengan Pendamping Desa dan KRTP desa Karangsono



Usaha yang dijalankan salah satu KRTP Sasaran Programdi Desa Sidodadi



Wawancara dengan Pendamping Desa dan KRTP desa Slorok



Usaha yang dijalankan salah satu KRTP Sasaran Programdi Desa Sukosewu



Wawancara dengan Kades dan Pendamping Desa Sumberagung



Wawancara dengan Pendamping Desa dan KRTP Desa Sumberagung